

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM  
MENINGKATKAN DAYA SAING BERBASIS POTENSI  
DAERAH**

**(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Jombang)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi**

**Universitas Brawijaya**

**Disusun oleh:**

**YANUAR DANANTYO N.**

**NIM. 0710310098**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

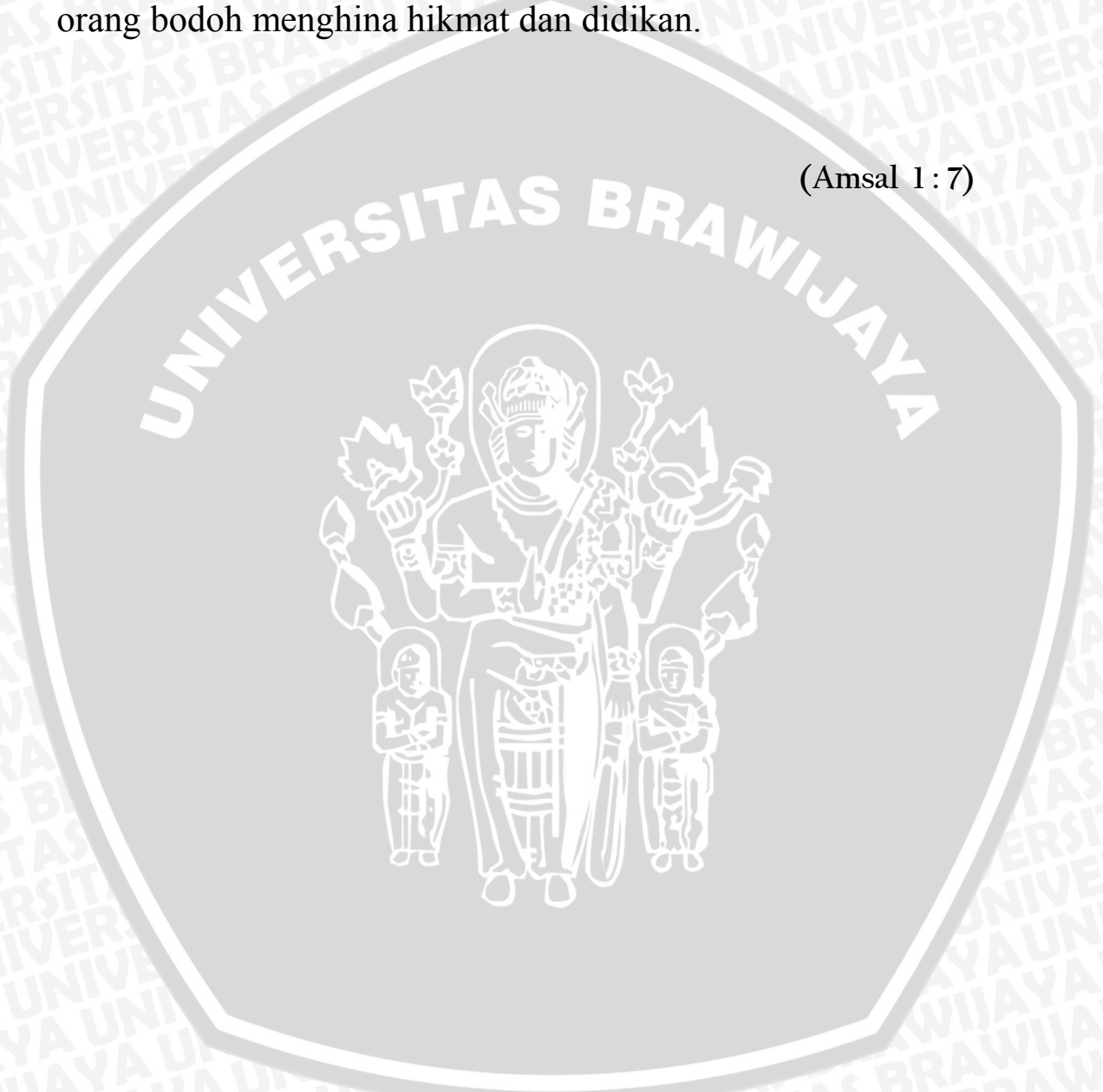
**MALANG**

**2012**

## MOTTO

Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1 : 7)



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : SELASA  
 Tanggal : 13 DESEMBER 2011  
 Jam : 10.00  
 Skripsi atas nama : YANUAR DANANTYO N  
 Judul : STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BERBASIS POTENSI DAERAH (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG)

dan dinyatakan lulus

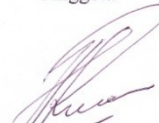
MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Tjahjanulin Domai, MS  
 NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



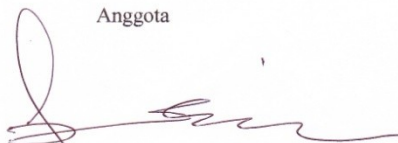
Drs. Heru Ribawanto, MS  
 NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Drs. Bambang Santoso Haryono, MS  
 NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Fadillah Putra, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19720405 200312 1 001



## Pernyataan Orisinalitas

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, November 2011

Mahasiswa



TTD

Nama : Yanuar Danantyo Nugroho

NIM : 0710310098

## RINGKASAN

Yanuar Danantyo, 2007, **"Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Jombang)"**., Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Anggota: Drs. Heru Ribawanto, MS., 128 Hal+ xxi

Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangkaun masa depan serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan." Tujuan dari strategi adalah untuk mendapatkan langkah-langkah yang akan diimplementasikan berikutnya.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengupayakan distribusi pendapatan masyarakat secara lebih adil. Dalam hal pembangunan ekonomi tentu ada berbagai macam segi atau aspek atau peran pelaku ekonomi. Akan tetapi jika melihat dari tujuan pembangunan ekonomi antara lain adalah meningkatkan meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian secara makro (berdasarkan PDRB) Kabupaten Jombang? Dan bagaimana strategi pembangunan ekonomi Jombang dalam meningkatkan daya saing?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat-alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis LQ / Shift Share

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan kekuatan sektor basis yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang. Namun sektor yang mampu bersaing justru bukan pertanian melainkan perdagangan. Dalam meningkatkan daya saing pertanian Kabupaten Jombang, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik di dalam perencanaan berdasarkan RPJP, RPJM maupun RTRW. Dengan membuat kawasan agropolitan diharapkan pertanian Kabupaten Jombang mampu bersaing. Oleh Karena itu untuk mampu mewujudkan visi Menjadikan Jombang Sebagai Sentra Agrobisnis Di Jawa Timur 2025 perlu kerja keras baik pemerintah maupun masyarakat dari Kabupaten Jombang.



## SUMMARY

Yanuar Danantyo, 2007, "**Economic Development Strategies in Improving the Potency Based Regional Competitiveness (Studies in Regional Development Planning Board District. Jombang)**", Chairman of the Committee Advisor: Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Members: Drs. Heru Ribawanto, MS., 128 + xxi It

Strategy is a plan for large-scale range of future-oriented and set in such a way that enables organizations to effectively interact with their environment under conditions of competition are all aimed at optimizing the achievement of organizational goals and the goals are concerned. "The objective of strategy is to get the measures will be implemented next.

Development is essentially a business that will affect and change the potential sources and environmental conditions. Economic development is a series of efforts and policies that aim to improve people's lives, expanding employment, to seek the distribution of income in a more equitable society. In terms of economic development there are certainly different aspects or aspects or roles of economic actors. However, if seen from the objectives of economic development, among others, is to increase supply and improve the distribution of the basic needs of society.

Based on this, the formulation of the problem in this study is how the macro-economic conditions (based on GDP) Jombang? And how Jombang economic development strategy in enhancing competitiveness?

This research uses descriptive research. The source data consists of primary data and secondary data collected by the technique of collecting data through observation, interview and documentation. The research instrument consists of researchers themselves, interview guidelines, and stationery. Data analysis in this study using LQ analysis / Shift Share.

The results of this study indicate that the agricultural sector is the power base that is owned by Jombang. But the sector that can compete not just agriculture but commerce. In enhancing agricultural competitiveness Jombang, the government has done a lot of effort both within the planning based on RPJP, and Spatial Development Plan. By making the area of agriculture is expected agropolitan Jombang able to compete. Hence to be able to realize the vision of the Center For Jombang Making Agribusiness in East Java in 2025 need to work hard both government and society of Jombang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : “Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Sumartono .MS selaku Kepala Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk,S.Sos,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai. MS selaku dosen pembimbing utama, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Dr. Bambang Santoso H, MS selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran agar dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

6. Fadillah Putra, S.Sos M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran agar dapat lebih menyempurnakan skripsi ini
7. Bapak Supangkat, SE. MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Jombang yang telah memberikan ijin untuk penelitian skripsi saya.
8. Bapak Adi Prasetyo, S.P selaku Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Jombang beserta staf-stafnya yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan serta informasi mengenai perekonomian Kabupaten Jombang.
9. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	6
E. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Strategi .....	9
1. Pengertian Strategi .....	9
2. Syarat-Syarat Strategi .....	11
3. Manfaat Strategi .....	11
4. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah .....	12
B. Pembangunan .....	17
1. Definisi Pembangunan .....	17
2. Tujuan Pembangunan .....	18
3. Unsur-Unsur Pembangunan .....	19
4. Ciri-Ciri Pembangunan .....	20
5. Paradigma Pembangunan .....	20
C. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	21
1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah .....	21
2. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah .....	23
D. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah .....	24
1. Definisi Strategi Daya Saing Daerah .....	24
2. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah .....	20
3. Daya Saing Dengan Strategi Berbasis Potensi Daerah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	30
C. Lokasi penelitian dan Situs Penelitian .....	32
D. Variabel Dan Pengukuran .....	32
E. Populasi Dan Sampel .....	36

F. Sumber dan Jenis Penelitian .....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
H. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang .....	44
1. Kondisi Geografis .....	44
2. Sosial budaya .....	50
3. Prasarana dan Sarana .....	56
B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.....	56
1. Profil BAPPEDA Kabupaten Jombang .....	56
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	56
3. Visi dan Misi .....	58
4. Sumber Daya Manusia .....	59
C. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	61
1. Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Jombang .....	61
a. Pertanian .....	62
b. Pertambangan dan Penggalian .....	64
c. Industri Pengolahan .....	65
d. Listrik, Gas, dan Air Bersih .....	65
e. Bangunan .....	66
f. Perdagangan, Restoran, dan Perhotelan .....	67
g. Pengangkutan dan Komunikasi .....	68
h. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan .....	70
i. Jasa-Jasa .....	71
2. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang .....	74
a. Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kab. Jombang .....	74
b. Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis .....	70
D. Analisa Data Penelitian .....	122
1. Analisa Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Jombang .....	122
2. Analisa SWOT Perekonomian Kabupaten Jombang .....	141
3. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang .....	143
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

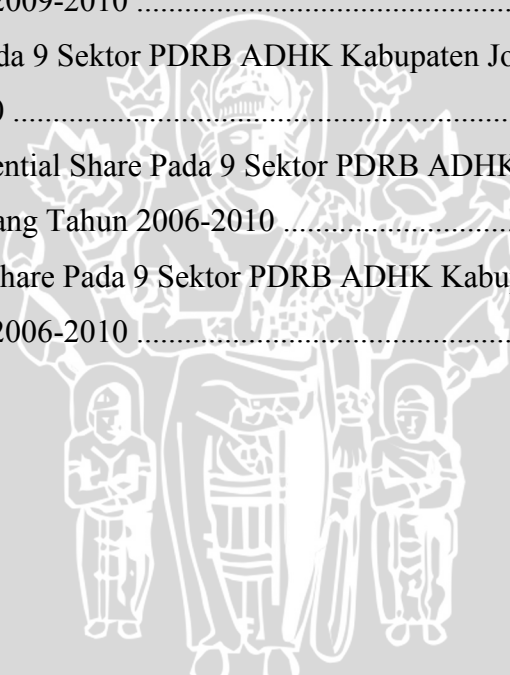


## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah.....	24
2	Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan .....	55
3	Komposisi Menurut Jabatan .....	55
4	Komposisi Menurut Pendidikan .....	56
5	Hasil Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2006-2010	64
6	Hasil Produksi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Jombang tahun 2006-2010 .....	64
7	Hasil Produksi Sektor Industri Pengolahan 2006-2010 .....	65
8	Hasil Produksi Sektor Listrik, Air, dan Gas Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	66
9	Hasil Produksi Sektor Bangunan Kabupaten Jombang tahun 2006-2010	67
10	Hasil Produksi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	68
11	Hasil Produksi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	70
12	Hasil Produksi Sektor Keuangan dan Persewaan Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	71
13	Hasil Produksi Sektor Jasa-Jasa PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	74
14	Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Pertanian .....	82
15	Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Di Kabupaten Jombang .....	84
16	Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Perdagangan Di Kabupaten Jombang .....	90
17	Analisis Location Quotient Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006-2007 .....	123
18	Analisis Shift Share Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006-2007 .....	125

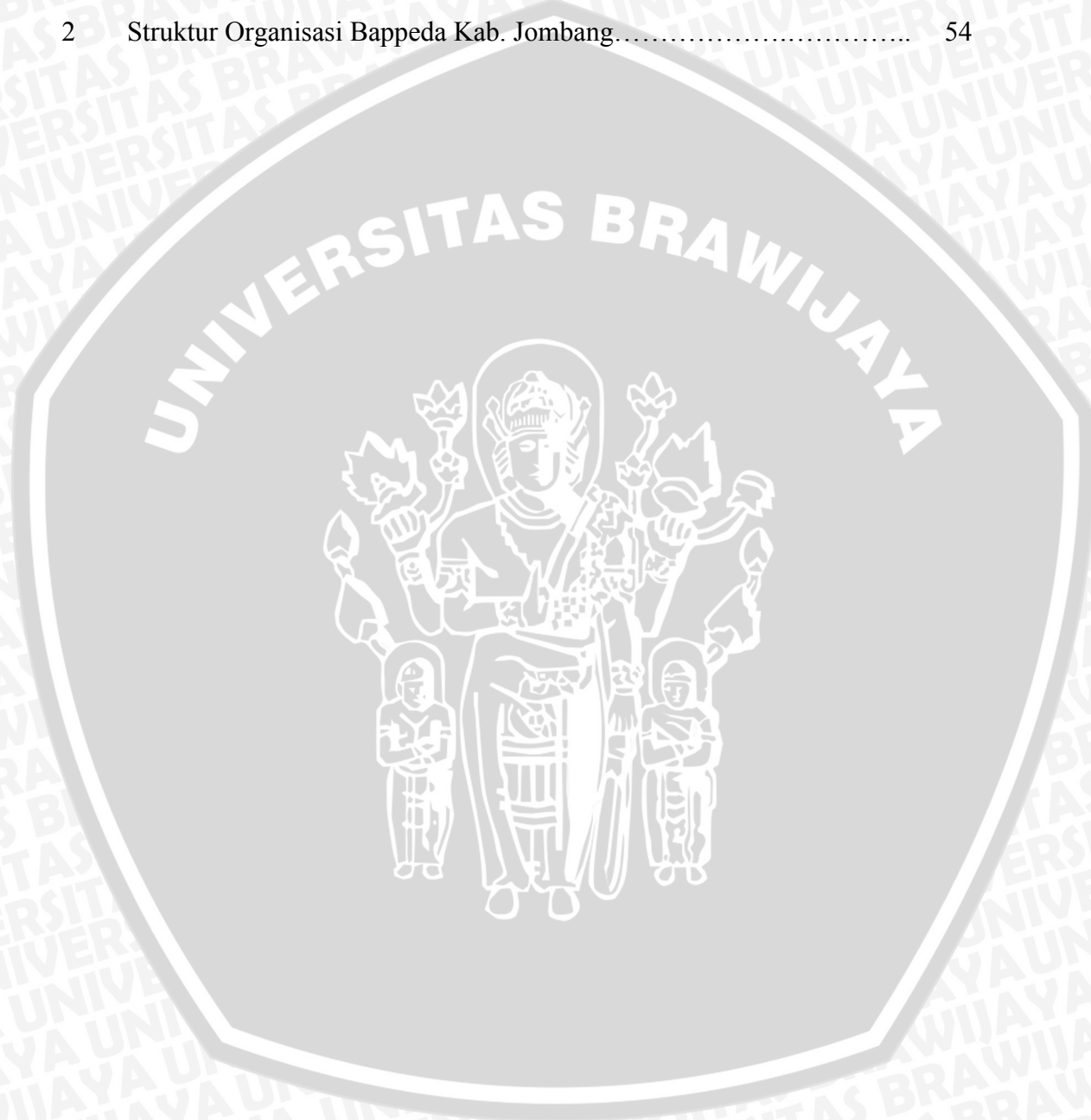


19	Analisis Location Quotient Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2007-2008 .....	127
20	Analisis Shift Share Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2007-2008 .....	129
21	Analisis Location Quotient Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2008-2009 .....	131
22	Analisis Shift Share Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2008-2009 .....	133
23	Analisis Location Quotient Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2009-2010 .....	135
24	Analisis Shift Share Sembilan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2009-2010 .....	136
25	Rata-Rata LQ Pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2007-2010 .....	138
26	Rata-Rata Differential Share Pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	139
27	Rata-Rata Shift Share Pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 .....	140



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Peta Administrasi Kabupaten Jombang .....	41
2	Struktur Organisasi Bappeda Kab. Jombang.....	54







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan melibatkan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Perencanaan digunakan berdasarkan tujuan yang jelas, karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu perencanaan digunakan untuk menghasilkan sesuatu cara atau upaya atau tindakan secara optimal dan terarah. Sebab jika suatu tindakan atau pekerjaan tidak dilakukan melalui perencanaan yang baik maka hasil yang didapatpun juga tidak baik.

Tujuan dari perencanaan adalah untuk mendapatkan rencana-rencana yang akan diimplementasikan berikutnya. Oleh sebab itu, maka dalam melakukan perencanaan hendaknya memperhitungkan aspek-aspek perencanaan tersebut. Sebab dalam perencanaan tentu harus mampu mempertimbangkan segala kemungkinan yang bakal terjadi terutama faktor penghambatnya. Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai, seperti statistik. Oleh karena itu menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mengupayakan tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan (Kartasasmita, 2011: 21).

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, tentunya perlu suatu perencanaan yang terprogram dengan baik. Bagaimanapun wujud dari suatu

pembangunan tidak dapat lepas dari bagaimana perencanaannya. Perencanaan pembangunan sifatnya sangat penting, karena perencanaan merupakan suatu kerangka dari pembangunan itu sendiri. Untuk pembangunan ekonomi, perencanaan penting karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup (Tjokroamidjojo, 1994: 67), pembangunan bisa dikatakan maksimal jika perencanaannya disiapkan secara baik.

Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila dilaksanakan oleh dan hasilnya dirasakan secara meluas dan merata. Dengan basis perekonomian yang lebih luas tidak terpusat pada perorangan, sekelompok orang atau perusahaan, atau daerah tertentu ketahanan perekonomian nasional terhadap guncangan-guncangan ekonomi eksternal dan internal menjadi lebih kukuh. Inti dari semua itu adalah pentingnya mengembangkan ekonomi rakyat sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional.

Arah perkembangan ekonomi seperti itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Bahkan pengalaman empiris menunjukkan bahwa dengan hanya pendekatan pertumbuhan yang terjadi justru adalah sebaliknya, yaitu makin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi; yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau bahkan makin miskin. Masalah utamanya, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dasar



pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya (Kartasmita, 2007:4).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengupayakan distribusi pendapatan masyarakat secara lebih adil. Dalam hal pembangunan ekonomi tentu ada berbagai macam segi atau aspek atau peran pelaku ekonomi. Akan tetapi jika melihat dari tujuan pembangunan ekonomi antara lain adalah meningkatkan meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Selain meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses supaya saling berkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara faktor – faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat (Sukirno, 1987:13).

Pembangunan ekonomi dapat kita lihat dengan menggunakan indikator-indikator yang bisa menjadi petunjuk. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi regional terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Salah satu indikator pembangunan ekonomi regional adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi tujuan utama dari pembangunan ekonomi



bukanlah untuk pertumbuhan PDRB, melainkan bagaimana upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi masyarakat yang juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi pendapatan daerah yang juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategi pembangunan ekonomi melalui pengembangan daya saing berbasis potensi daerah khususnya dibidang industri, bisa menjadi langkah yang logis daripada berambisi menyaingi suatu produk industri yang menjadi unggulan dari potensi daerah lain. Sebab dengan cara meningkatkan daya saing berbasis potensi daerah, suatu daerah dapat dimungkinkan masih mampu bersaing dengan daerah lain di “kandang” sendiri atau daerah tersebut, terlebih lagi jika mampu menguasai pasar lokal daerah lain. Selain itu dengan meningkatkan daya saing berbasis potensi, suatu daerah bisa menjaga roda perekonomiannya terutama industry agar tetap berjalan *continue*. Untuk menghadapi permasalahan globalisasi perdagangan, dengan menggunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah khususnya di bidang industri, diharapkan mampu memberikan kontribusi dan bisa menjadi sektor yang paling diandalkan oleh daerah.

Kabupaten Jombang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia cepat atau lambat pasti akan merasakan dampak baik itu positif maupun negatif dari kebijakan nasional yang ikut dalam globalisasi perdagangan. Yang menjadi persoalan adalah dampak negatif dari perdagangan bebas tersebut yang bisa mengancam sektor-sektor ekonomi daerah khususnya industri di Kabupaten Jombang. Industry-industri Kabupaten Jombang yang bakal terancam dengan kebijakan nasional tersebut adalah seluruh sektor - sektor industri baik itu industri besar sampai dengan kecil. Hal ini dikarenakan industri-industri dalam negeri tak

terkecuali di Kabupaten Jombang pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (*high cost production*) sehingga kurang mampu bersaing secara harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Dampak yang lebih mengerikan dari ketidakmampuan dalam bersaing adalah turunnya tingkat produksi dan bangkrutnya industri-industri tersebut dan menyebabkan pengangguran semakin meningkat akibat dari banyaknya PHK (Putus Hubungan Kerja).

Dalam rangka mempertahankan ekonomi nasional, khususnya daerah dalam hal ini Kabupaten Jombang dituntut mampu memberikan kontribusi dalam mempertahankan ekonomi nasional. Strategi-strategi yang tepat dari pemerintah Kabupaten Jombang saat ini penting untuk menyelamatkan ekonomi lokal dari serangan barang-barang impor di masa mendatang. Dengan strategi mengembangkan potensi industri daerah yang dimiliki, maka diharapkan Kab. Jombang masih mampu untuk terus membangun perekonomiannya dalam rangka meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakatnya.

Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi yang berkarakter dan tentunya mampu memberi kesejahteraan serta pemerataan yang diharapkan, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang: **STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BERBASIS POTENSI DAERAH. (Studi pada BAPPEDA Kabupaten Jombang)**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana kondisi perekonomian secara makro (berdasarkan PDRB) Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi Jombang dalam meningkatkan daya saing?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kondisi perekonomian makro dan potensi yang ada di Kabupaten Jombang berdasarkan PDRB.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi pembangunan ekonomi Jombang dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi.

## D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan atau sumbangan ide dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kab. jombang.
2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai kerangka atau sumber untuk penelitian dalam pembangunan ekonomi daerah.



3. Mendapatkan suatu arah yang jelas mengenai pentingnya perencanaan pembangunan ekonomidaerah.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sitematika pembahasan sebagai arahan dalam penulisan dan penelitian ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang perlunya penulismengadakan penelitian, tujuan dan manfaat/kontribusi diadakannyapenelitian ini, serta kerangka pemikiran dalam penelitian yang akandiadakan. Selain itu, bab ini mengemukakan pula rumusan masalah untukmemfokuskan hal-hal yang akan diteliti.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka mengemukakan teori-teori yang berkaitan denganOtonomi Daerah dan desentralisasi,perencanaan pembangunan,pembangunan ekonomi, dan Pembangunan ekonomi daerah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situspenelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data yangakan dijalankan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian atau data yang telah diperoleh dari situs dalam penelitian yang telah dilakukan, kemudian dilakukan analisa data dan penafsiran data dengan menggunakan teori yang telah adadalam bab sebelumnya.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Setiap organisasi, baik itu organisasi publik, maupun organisasi privat mempunyai sejumlah langkah-langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktifitas kegiatan. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rangkaian dari perencanaan suatu kegiatan, yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Istilah strategi menurut Siagian (1989:10) berasal dari Bahasa Yunani "*stratos*" yang berarti "pasukan" dan "*again*" yang berarti "memimpin". Siagian (2002:17) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud strategi bagi organisasi adalah:

"Rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan."



Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:964) adalah:

1. Ilmu dan seni menggunakan menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
2. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan.
3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus.
4. Tempat yang baik menurut siasat perang.

Stoner, Freeman dan Gilbert (dalam Tjiptono, 2000:3)

mendefinisikan strategi berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:

1. Dari perspektif apa yang organisasi ingin lakukan (*intends to do*). Sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.
2. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya.

Afif (1987:9) menyatakan bahwa strategi adalah suatu tindakan penyesuaian tertentu untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu (baru dan khas) yang dianggap penting dimana tindakan penyesuaian dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Tjokroamidjojo (1993:13) mendefinisikan strategi sebagai:

“Keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Selain itu strategi merupakan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan (*policy decision and execution*) dalam mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi. Seperti yang dikemukakan oleh Sukirno (1985:50) menyatakan bahwa di dalam menyusun strategi pembangunan ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain:

1. Masalah-masalah yang dihadapi
2. Jumlah dan kualitas sumber-sumber daya, dalam bentuk modal, tenaga ahli, keahlian pengusaha dan pengetahuan teknik yang tersedia.
3. Tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dituju.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rangkaian kebijaksanaan atau langkah-langkah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan, dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Syarat-syarat Strategi**

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Siagian (2002:102-103) agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal mutlak yang perlu diperhatikan :

1. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi.  
Strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negative atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
2. Strategi harus memperhitungkan secara realistic kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk mengiperasionalkan strategi tersebut.



3. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolok ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya.

### 3. Manfaat Strategi

Strategi pada umumnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan secara ilmiah. Menurut Jan Tinbergen (dalam Haryono Sudriamunawar, 2002:52) ada empat tujuan pokok dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan:

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Disadarinya potensi serta manfaat pembangunan baik oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat.
3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam kelompok dasar.
4. Terlaksananya langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka memberikan kemudahan dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Secara implisit Siagian (2002: 206-209) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang.
2. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
4. Dapat mengetahui secara konkrit dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran dan atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang-bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki.



5. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
6. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta interaksi, interdependensi dan interrelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### 4. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Secara garis besar Arsyad (dalam Subandi 2009 h 122-124) menggambarkan strategi pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

1. Strategi Pembangunan fisik (*Locality Of Physical Development Strategy*).

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di

daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*civic center*) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pemebngunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu:

- a. Pembuatan bank tanah (*land banking*), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya, dsb.
- b. Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
- c. Penataan kota (*townscaping*), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik suatu bangunan.
- d. Pengaturan tata ruang (*zoning*) dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.
- e. Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja.

f. Penyediaan infrastruktur seperti : sarana air bersih, listrik, taman, sarana pakir, tempat olah raga, dsb

## 2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain:

- a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- b. Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
- c. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan



d. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.

e. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.

### 3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelatihan dengan system *customized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja.

b. Pembuatan bank keahlian (*skill banks*), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah.

c. Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan daerah.

d. Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

#### 4. Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-Based Development Strategy*)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan memberdayakan (*empowerment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat social, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan usahanya.

## B. Pembangunan

### 1. Definisi Pembangunan

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya mengandung arti:

1. Bangun dalam arti sadar/siuman (aspek fisiologi)

2. Bangun dalam arti bangkit/berdiri sendiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi)
4. Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik dianalogikan dengan konsep pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembauran, pembangunan, pengembangan dan pembinaan (Suryono, 2001:26)

Sedangkan menurut Bryant and White definisi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri (*sustainability*)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dan saling menghormati (interdependensi) (Suryono, 2001: 37)

Hakekat dari pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Selain itu pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana yang dilakukan



secara terus menerus di berbagai aspek untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

## 2. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan menurut Djamin ada 3 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
2. Meningkatkan taraf hidup, antar lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani)
3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perseorangan dan bangsa dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan (Djamin, 1984: 9)

Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil sehingga masyarakat bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan keadaan serba kekurangan.

## 3. Unsur-unsur Pembangunan

Didalam pelaksanaan pembangunan terdapat unsure-unsur pembangunan yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Proses, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus.
2. Sadar, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.
3. Berencana, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Modernitas, bahwa pembangunan mengarah pada modernitas. Sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

5. Multi-dimensional, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
6. *Nation Building*, bahwa kesemua hal tersebut diatas ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1990: 3-4).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana yang mengarah pada modernitas dan bersifat multi-dimensional yang bertujuan untuk membina bangsa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 4. Ciri-ciri Pembangunan

Tjokrowinoto menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu) yang dasarnya tidak jelas, dengan ciri-ciri pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar dan terencana.
3. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bebas nilai.
4. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat (Tjokrowinoto, 1990).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembangunan menyangkut suatu proses perubahan dilakukan secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah masa depan yang lebih baik.



## 5. Paradigma Pembangunan

Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya, menjadi kegiatan untuk membangun dirinya sendiri yang kemudian menjadi semacam alat kepentingan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa. Paradigma pembangunan yang pada suatu waktu tertentu akan menjadi acuan pembangunan nasional dapat saja mengalami proses demistifikasi, digantikan oleh paradigma-paradigma baru yang bermunculan. Kecenderungan negara-negara berkembang untuk meniru negara-negara maju tersebut, seringkali dilakukan dengan cara mengambil unsur-unsur yang baik saja tanpa mempertimbangkan faktor ekologi yang melatarbelakangi prestasi negara-negara maju yang sesungguhnya dicapai melalui waktu berabad-abad dengan perjuangan kerja keras dari bangsanya untuk mencapai keberhasilan.

Menurut Tjokrowinoto (1999: h.8) ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara, yaitu pertumbuhan, welfare state, neo ekonomi, structuralize dan humanizing. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu : pertumbuhan, kesejahteraan, dan people centered. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma "people centered development".

Paradigma pembangunan berwawasan manusia mempunyai arti bahwa manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting.



Dengan demikian Tjokrowinoto menyimpulkan bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan dan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu : kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

### **C. Pembangunan Ekonomi Daerah**

#### **1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah**

Arsyad (dalam Subandi, 2009:116-117) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang ada harus mampu menghitung potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

## 2. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori Pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan alternative untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita ketahui bahwa kerangka berpikir dalam konsep pembangunan ekonomi daerah yang lama adalah :

1. Dalam rangka memberikan kesempatan kerja, maka semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja.
2. Basis pembangunan terletak pada pengembangan sektor ekonomi.
3. Pengalokasian asset-aset didasarkan pada keunggulan komparatif asset-aset fisik.
4. Sumberdaya pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja.

Sedangkan dengan paradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan pengalokasian asset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasar pada kualitas lingkungan. Disamping itu juga sumberdaya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah (Subandi, 2009 :120-121).



Tabel 2.1

Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Arsyad (dalam Subandi 2005:121)

**D. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah**

**1. Definisi Strategi Daya Saing Daerah**

Dalam bahasa asing, kata “*global competitiveness*”, diartikan sebagai ”daya saing global”. Porter (dalam Sumihardjo 2008:8) Kata “*competitive advantage*” diartikan “keunggulan bersaing”, dan kata “*competitive strategy*” diberi arti “ Strategi bersaing”. Jelaslah kalimat daya saing adalah sama dengan *competitiveness* atau *competitive*..

Dalam bahasa lain Sumihardjo mengatakan bahwa (2008:8) kalimat daya saing dimaknai secara bebas kata daya dalam kalimat daya saing bermakna kekuatan dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain atau beda dengan yang lain dari segi mutu atau memiliki keunggulan



tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan oleh seorang, kelompok atau institusi tertentu.

Konsep daya saing dikemukakan oleh Abdullah (dalam Sumihardjo 2008:8-9) “adalah konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestic maupun global dari pesaing yang ada di lingkungan wilayahnya”. Berbicara daya saing maka erat hubungannya dengan kemampuan ekonomi daerah untuk iku dalam persaingan. Syafar dalam Muktianto seperti yang dikutip Sumihardjo (2008:9) lebih dalam menyatakan bahwa kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar secara berkelanjutan.

Konsep lain tentang daya saing seperti yang dikemukakan oleh Michael E . Porter (dalam Sumihardjo 2008:10) dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam membahas daya saing yaitu:

1. Strategi bersaing adalah suatu bidang yang menjadi perhatian utama para manajer , yang sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai industry dan para pesaing. Strategi Bersaing membahas cara dengan mana perusahaan dapat bersaing secara lebih efektif untuk memperkuat posisi pasarnya.
2. Pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan social sebagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi, aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industry atau industri-industri dalam mana perusahaan tersebut bersaing.



3. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat menyokong kinerjanya, seperti inovasi, budaya kohesif, atau pelaksanaan yang baik.
4. Strategi bersaing bertujuan menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat diperthankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industry.

Dari definisi diatas dapat ditarik suatu pemahaman dasar dari strategi bersaing kemudian pemahaman tersebut diadopsi dan dijadikan dasar pemahaman daya saing. Selanjutnya oleh Sumihardjo (2008:11) mendefinsikan daya saing yaitu:

1. Daya saing adalah kemampuan untuk meningkatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan.
2. Daya saing adalah aktivitas mengukur dan membandingkan untuk mengetahui seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan.
3. Daya saing daerah adalah kemampuan memadukan faktor kondisi lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan public, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk memperkokoh posisi daerahnya.

## **2. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah**

Sumihardjo 2008:12 Kata kunci pemahaman daya saing berbasis potensi daerah terletak pada kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya. Kemampuan menjadi unggul merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas sumber-sumber yang dimiliki daerah agar menguntungkan masyarakat daerah.



Konsep potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata (*tangible*) seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata, seperti ketrampilan, keahlian, proses dan moral. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menlaah komponen Produk Domestik Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan.

Potensi Daerah seperti yang disimpulkan Muktianto (dalam Sumihardjo 2008:12) merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sumihardjo (2008:12) potensi daerah pada umumnya meliputi:

1. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan peternakan.
2. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan.
3. Potensi energy dan sumber daya mineral seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa.
4. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi, dan pariwisata.
5. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.

### 3. Daya Saing dengan Strategi Berbasis Potensi Daerah

Menurut Sumihardjo (2008: 8) Jika merujuk pada kata daya saing adalah upaya atau usaha untuk menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau institusi tertentu. Kata strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Sedangkan kata kunci dari berbasis potensi daerah menurut Sumhardjo (2008:11) adalah kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya.

Jadi jika dihubungkan antara daya saing dengan strategi berbasis potensi daerah adalah sama-sama berupaya untuk menjadi unggul. Hanya dengan ditambah kata strategi dalam konsep strategi berbasis potensi daerah, maka berubah menjadi tindakan atau *action* yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan dan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu fenomena yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai karya yang mempunyai nilai ilmiah.

Awal dari penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Untuk menganalisa fenomena-fenomena tersebut dibutuhkan suatu penelitian untuk bisa mengurai fenomena-fenomena tersebut menjadi jelas.

Penelitian yang akan dilakukan digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran secara sistematis, factual atas fenomena dan permasalahan yang akan dipecahkan. Penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Metodologi deskriptif menurut Moleong (2006: 11) diartikan sebagai: “Penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa”.



Sementara itu, Nazir (2003: 54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan mendeskripsikan strategi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi khususnya pada Kabupaten Jombang provinsi Jawa Timur.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan data yang akan diamati, dikumpulkan, diolah dan dianalisa oleh peneliti dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah pusat perhatian yang bermaksud membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2006: 12) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus; dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Menurut Moleong (2006: 94), fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi. Jadi, peneliti tidak perlu kesanakemari untuk mencari subyek penelitian karena dengan sendirinya dibatasi oleh fokus.
2. Penetapan fokus yang jelas dan tepat berfungsi agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang harus dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun data mana yang akan dibuang.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian dari ” Strategi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) adalah:

1. Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Jombang berdasarkan PDRB
2. Strategi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi yaitu:
  - a. Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
    - 1) Strategi pembangunan ekonomi dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Jombang
    - 2) Strategi pembangunan ekonomi berdasarkan RTRW

b. Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis

- 1) Strategi Pembangunan kawasan Agropolitan
- 2) Pengembangan Sektor Pertanian

**C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian, peneliti berharap mampu memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi” dilaksanakan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,

Situs penelitian yang bakal menjadi tujuan penulis untuk mendapatkan input data – data yang diperlukan untuk tema Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Jombang.

**D. Variabel dan Pengukuran**

Variable adalah subyek penelitian atau hal yang yang menjadi perhatian dari sebuah penelitian (Suharsimi, 1998:33). Variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Ada dua jenis variable (Nazir 2003, 123-124), yaitu:



a. Variabel Kontinu

variable yang dapat ditemukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan decimal yang tidak terbatas. Contoh variable ini adalah berat, tinggi, luas, pendapatan, dan sebagainya.

b. Variabel Descrete

Variabel Descrete adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau decimal. Variable ini sering dinyatakan sebagai variable kategori. Adapun variabel dalam menjawab rumusan masalah yang pertama adalah:

Tabel 3.1

Variabel, Indikator, dan Pengukuran dalam Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merupakan jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu region atau wilayah selama jangka waktu tertentu yaitu satu tahun	-	-
2.	Sektor-sektor PDRB. Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Ada sembilan sektor, yaitu: <i>pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan dan perhotelan; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; jasa-jasa</i>	-	-

<p>3.</p>	<p>Sektor Unggulan. Merupakan variable yang didapatkan setelah melakukan pembagian dengan seluruh jumlah PDRB Kabupaten kemudian dibagikan lagi dengan sektor yang sama ditingkat Provinsi dan jumlah PDRB Provinsi.</p>	<p>Hasil perhitungan <math>&gt; 1</math>                      Hasil perhitungan <math>= 1</math>                      Hasil perhitungan <math>&lt; 1</math></p>	<p>Jika hasilnya <math>&gt; 1</math>, sektor tersebut adalah sektor unggulan (basis) dan bisa ekspor;                      Jika hasilnya <math>= 1</math>, sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Jombang;                      Jika hasilnya <math>&gt; 1</math> sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kabuaptan Jombang, dan dimungkinkan untuk melakukan impor.</p>
-----------	--	---	--

4	Variabel National Share. pertambahan PDRB suatu daerah seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB propinsi selama periode waktu tertentu.	-	-
5.	Variabel Proportional Shift (Pj). Variable yang menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor di Kabupaten Jombang dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.	Pj bernilai +  Pj bernilai -	<p>Jika Pj bernilai + maka sektor i tumbuh lebih cepat di Kabupaten Jombang dibandingkan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Jika Pj bernilai - berarti sektor i tumbuh lebih lambat di Kabupaten Jombang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur</p>



<p>6.</p>	<p>Variabel Differential Shift (Dj). Variable yang menunjukkan tingkat kompetisi satu sektor dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Dj bernilai +  Dj bernilai -</p>	<p>Jika Pj bernilai + maka sektor i lebih kompetitif di Kabupaten Jombang dibandingkan Provinsi Jawa Timur  Jika Pj bernilai - berarti sektor i lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Kabupaten Jombang</p>
-----------	--	---	---

Sumber: Tarigan, 2009:86-87

**E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 1998:103). Populasi dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektoral Kabupaten Jombang dan Jawa Timur tahun 2004 sampai 2009 yang dihitung berdasarkan harga konstan. Sedangkan sample adalah sebagian dari populasi yang menjadi. Tidak ada sampel yang digunakan dalam penelitian ini karena peneliti menggunakan keseluruhan PDRB kabupaten Jombang tahun 2004-2009.



## F. Sumber dan Jenis Penelitian

Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah yang menyangkut sumber data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Data-data yang dibutuhkan adalah seputar strategi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

- a) Kepala atau staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
- b) Sumber-sumber lain yang relevan.

### 2. Data Sekunder

Diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, dan dokumen yang berhubungan dengan tema “Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nazir (2003: 174) mengemukakan bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya berdasarkan data-data tertulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Interview (wawancara)

yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan/tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun/mengumpulkan bahan dari berbagai dokumen atau data, salinan atau arsip, atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian strategi perencanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi di bidang industri guna menghadapi globalisasi perdagangan.

3. Observasi

Yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tema penelitian.



#### 4. Studi Pustaka

Studi literatur merupakan metode mencari, membaca, mempelajari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini disebut data sekunder.

#### H. Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam penelitian karena dengan dianalisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan dan Talyor (dalam Moleong, 2006:280) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Analisis data dimulai dengan menghimpun data yang ada, baik yang diperoleh dari proses wawancara, pengamatan, pencatatan, serta dokumen-dokumen yang ada.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh, terutama data yang langsung berhubungan dengan fokus yang dilakukan oleh peneliti diharapkan akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman terhadap teori hasil kepustakaan yang relevan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis LQ / Shift Share untuk rumusan masalah pertama, dan untuk rumusan masalah kedua berdasarkan teori-teori pada kajian pustaka.

## 1. Location Quotient Analysis (LQ Analysis)

Salah satu sasaran pembangunan terutama perekonomian satu daerah adalah terjadinya pergeseran struktur ekonomi satu wilayah karena pembangunan yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Tidak semua sektor dalam perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang sama dalam hal ini pemerintah akan dapat mengevaluasi dan membuat kebijakan sesuai dengan identifikasi sifat potensi-potensi, basis maupun tidak basis (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:20).

Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. dalam prakteknya penggunaan LQ meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya .

Rumus penghitungan LQ:

Untuk mengetahui sektor ekonomi basis atau non basis

$$\text{Dengan rumus LQ (sektor } i) = \frac{\sum X_{ir} / X_r}{\sum X_{in} / X_n}$$

X = nilai

i = sektor

r = regional

n = nasional / daerah diatas (r)

## (2) Shift Share Analysis

Lahirnya konsep *shift share analysis* atau analisis shift share dalam analisis ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari perhitungan indeks konsentrasi seperti Location Quotient. Dalam analisis Location Quotient tidak dijelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan struktur ekonomi, sedangkan dengan analisis shift share perubahan struktur ekonomi wilayah dijabarkan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:25).

Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja



perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain (Arsyad 1999:314). Tiga bidang yang saling berhubungan itu meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dan perbandingannya.
2. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*) digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari satu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dibanding industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Rumus dari analisis *shift share* (Glasson 1990:95-96) adalah sebagai berikut:

$$G_j : Y_{jt} - Y_{jo}$$

$$: (N_j + P_j + D_j)$$

$$N_j : Y_{jo} (Y_t / Y_o) - Y_{jo}$$

$$(P + D)_j : Y_{jt} - (Y_t / Y_o) Y_{jo}$$

$$: (G_j - N_j)$$

$$P_j : [(Y_{it} / Y_{io}) - (Y_t / Y_o)] Y_{ijo}$$

$$D_j : [Y_{ijt} - (Y_{it} / Y_{io}) Y_{ijo}]$$

$$: (P + D)_j - P_j$$

Dimana:

$G_j$  : Pertumbuhan PDRB Total Kabupaten Jombang

$N_j$  : Komponen *Share* di Kabupaten Jombang

$(P + D)_j$  : Komponen *Net Shift* di Kabupaten Jombang

$P_j$  : *Proportional Shift* Kabupaten Jombang

$D_j$  : *Diferential Shift* Kabupaten Jombang

$Y_j$  : PDRB total Kabupaten Jombang

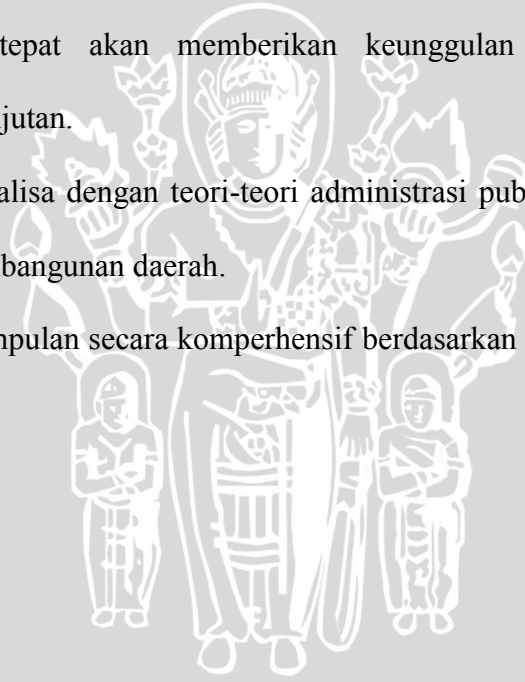
$Y$  : PDRB Total Propinsi Jawa Timur

$o, t$  : Periode Awal dan Periode Akhir Perhitungan

$i$  : Subskripsi Sektor (subsektor) pada PDRB

a. Analisis data, peneliti melakukan:

1. Menganalisa dengan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Menurut Hunger dan Wheelen (dalam Agung 2001; 193) analisis SWOT tersebut memiliki fungsi untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, disamping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki seperti keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki serta cara unggul yang dipergunakan. Penggunaan kompetensi secara tepat akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
2. Menganalisa dengan teori-teori administrasi public, pembangunan, dan pembangunan daerah.
  - b. Penarikan kesimpulan secara komperhensif berdasarkan data-data dan teori yang digunakan





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

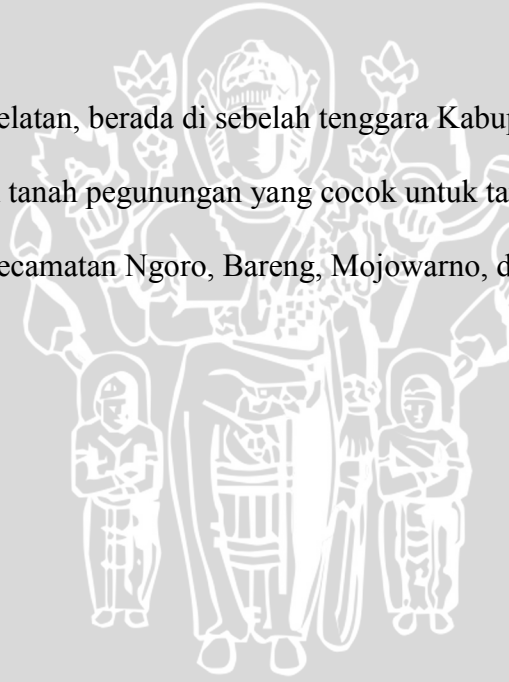
#### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jombang

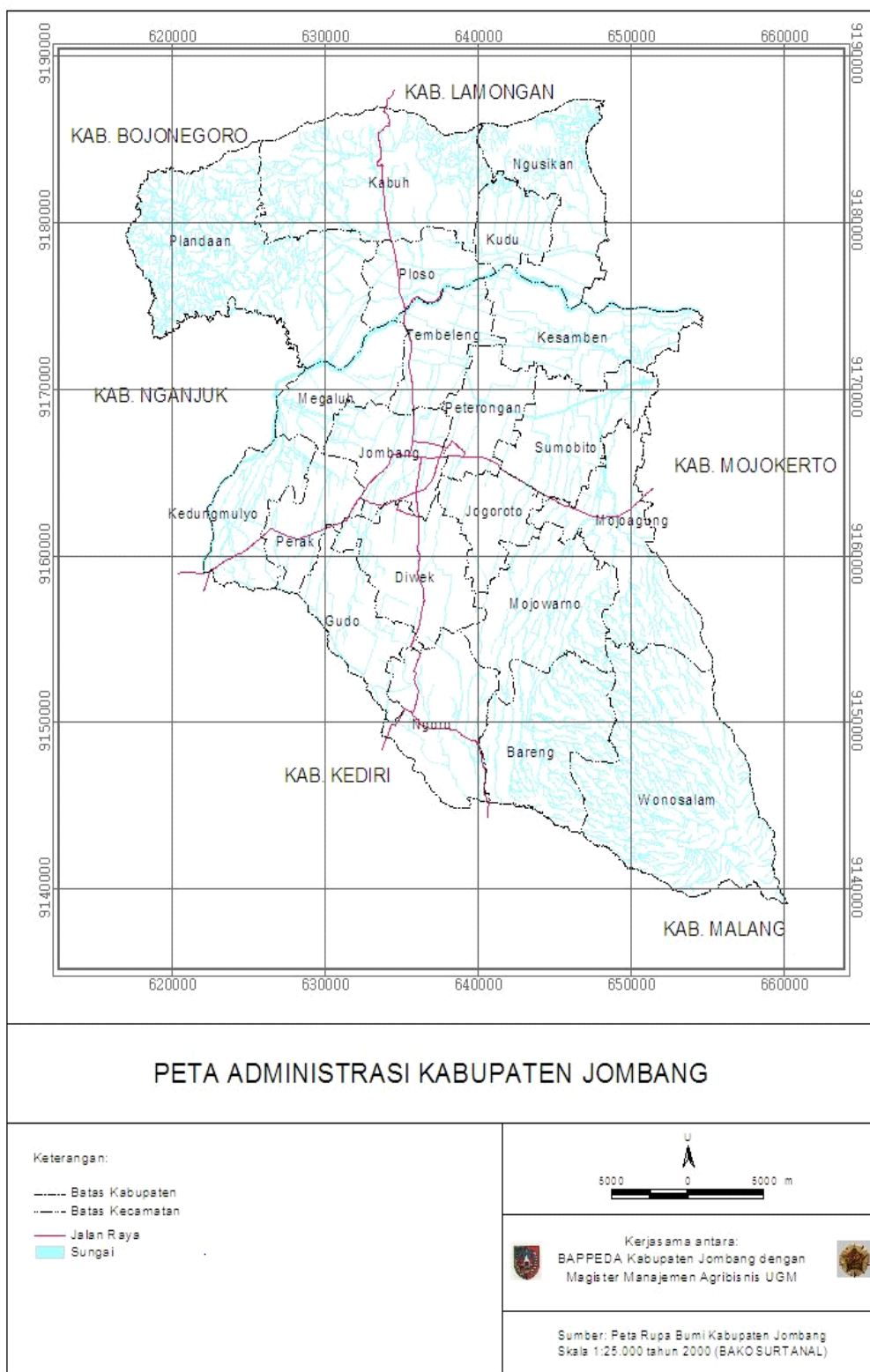
##### 4.1.1. Kondisi Geografis

###### Letak Geografis

Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur selatan jaringan jalan nasional Jakarta–Surabaya dan jalan provinsi Malang–Jombang–Babat, serta dilintasi rencana jalan tol yang menghubungkan Surabaya–Mojokerto–Jombang–Nganjuk. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus. Secara geografis, Kabupaten Jombang berada di antara  $112^{\circ} 20' 01''$  dan  $112^{\circ} 30' 01''$  Bujur Timur serta antara  $7^{\circ} 20' 01''$  dan  $7^{\circ} 45' 01''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jombang mencakup 1.159.50 km<sup>2</sup>, atau 2,5% dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah: Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu:

- a) Kawasan utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari pegunungan kapur yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan.
- b) Kawasan tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
- c) Kawasan selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.





**Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Jombang**



### **Ketinggian**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700 meter yang berada di Kecamatan Wonosalam.

### **Kemiringan Lahan**

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a) Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan
- b) Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- c) Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- d) Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan, dan Plandaan.

### **Geologi**

Kabupaten Jombang memiliki struktur geologi yang bervariasi, masing-masing jenis keadaan struktur geologi dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yaitu plitosen fasies gunung api, plitosen fasies sedimen,

alluvium fasies gunung api, pleistosen fasies sedimen, hasil gunung api kwarter tua, hasil gunung api kwarter muda dan aluvium.

### **Jenis Tanah**

Jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua, alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan mediteran merah. Adapun sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a) Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno, Bareng, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan Ngoro;
- b) Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol tersebar di wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Sumobito, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan;
- c) Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu dan Ngusikan;
- d) Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung;

- e) Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan Plandaan.

### **Klimatologi**

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20°C – 32°C.

### **Hidrologi**

Kabupaten Jombang memiliki beberapa aliran sungai. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang masuk dalam daerah aliran Sungai Brantas. Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang yaitu Sungai Brantas, Kali Konto, Kali Gunting, Kali Ngotok Ringkanal, Kali Gudo, Kali Afvour Besuk, dan Kali Jombang yang sebagian besar berhulu di Pegunungan Arjuno. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri–Nganjuk dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan aliran air bawah



tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh).

### **Penggunaan Lahan**

Kondisi tata guna tanah wilayah Kabupaten Jombang pada tahun 2007 meliputi daerah pemukiman seluas 27.852,80 ha (24,02%); lahan sawah seluas 50.100,83 ha (43,21%); tegalan seluas 13.617,36 ha (11,74%); hutan seluas 22.562,00 ha (19,46%); kawasan industri seluas 122,28 ha (0,11%), perkebunan seluas 675,98 ha (0,58%) dan lainnya seluas 1.012,61 ha (0,88%).

### **4.1.2. Sosial Budaya**

#### **Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2003-2007 mengalami peningkatan sebanyak 18.610 jiwa yaitu dari 1.155.449 jiwa pada tahun 2003 menjadi 1.174.050 jiwa pada tahun 2007 atau naik sebesar 1,61% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,43% per tahun. Pada kurun waktu tersebut tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jombang meningkat sebesar 1,5%, dari 997 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2003 menjadi 1.012 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2007.

#### **Ketenagakerjaan**

Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan karena penambahan angkatan kerja lebih besar daripada lapangan kerja, rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, serta adanya PHK. Jumlah kesempatan kerja tahun 2003-2007 berfluktuatif. Jumlah kesempatan kerja terbesar terjadi pada tahun 2004, yaitu sebanyak 3.100 orang. Upah minimum selama tahun 2007 sebesar Rp.

640.000,00/ bulan. Upah minimum selama tahun 2003-2007 mengalami kenaikan sebesar 4,34% - 30,34%, dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2006, yaitu sebesar 30,34% atau Rp 135.000,00. Jumlah penganggur terbuka/pencari kerja selama tahun 2003-2007 berfluktuasi. Jumlah pencari kerja tahun 2003-2006 rata-rata sebesar 62.585 orang dan pada tahun 2007 turun sebesar 19,73% dari tahun sebelumnya menjadi 45.288 orang. Persentase jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Jombang adalah pertanian sebesar 35,53%, industri sebesar 15,80%, perdagangan sebesar 25,44%, jasa sebesar 11,03% dan lainnya sebesar 12,20%. Sebagian besar pendidikan tenaga kerja, yaitu sebesar 36,75% berijazah setingkat SD, 22,76% berijazah setingkat SLTP, 15,14% tidak memiliki ijazah, 20,93% berijazah setingkat SLTA dan 4,41% berijazah perguruan tinggi (D-I sampai Sarjana).

### **Kesehatan**

Perkembangan kesehatan di Kabupaten Jombang dapat diukur dari perkembangan derajat kesehatan, yaitu angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian bayi menunjukkan trend penurunan dari angka 21 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 12,57 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 atau turun sebesar 40,14%. Sementara angka kematian ibu melahirkan sepanjang tahun 2003-2007 menunjukkan trend yang fluktuatif, dengan angka kematian terendah terjadi pada tahun 2004 yang tercapai sebesar 74 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka

kematian tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang tercapai sebesar 112 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian meskipun terjadi fluktuasi, capaian angka kematian ini lebih baik dari target nasional yang harus dicapai sebagaimana target dalam indikator Indonesia Sehat 2010.

### **Pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Hal ini dapat dilihat dari trend Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sementara (APS) dari semua tingkatan, mulai dari SD/MI sampai dengan tingkat SMTA/ sederajat yang mengalami trend naik turun dengan angka pergeseran yang relatif kecil. Sepanjang tahun 2003 - 2007 rata-rata APM untuk tingkat SD sebesar 91,85%, untuk tingkat SMTP/ sederajat sebesar 75,53%, dan untuk tingkat SMTA/ sederajat sebesar 55,65%. Sedangkan APK rata-rata SD/MI adalah sebesar 103,61%, tingkat SMTP/ sederajat rata-rata sebesar 96,45%; sedangkan untuk tingkat SMTA/ sederajat rata-rata sebesar 70,55%. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

### **Kesejahteraan Sosial**

Perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sepanjang tahun 2003 – 2007 menunjukkan penanganan yang sangat



baik. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan yang signifikan terhadap jumlah anak terlantar dan anak jalanan. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan hasil pendataan BPS pada tahun 2005 sebesar 78.053 KK miskin, pada tahun 2007 berkurang menjadi 74.340. KK miskin. Sementara yang masih perlu ditingkatkan penanganannya adalah gelandangan yang jumlahnya bertambah sebesar 13,66 %; dan korban penyalahgunaan Napza yang bertambah sebesar 29,17%. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang menurun. Suatu hal yang menggembirakan walaupun jumlahnya masih cukup besar. Namun sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata 3,08 % per tahun. Selama kurun waktu tersebut, prosentase jumlah penduduk miskin berkurang dari 20,18% pada tahun 2003 menjadi 18,88% dari jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Jombang pada tahun 2006.

#### **Agama dan Budaya**

Sepanjang tahun 2003 – 2007 komposisi jumlah pemeluk agama menunjukkan tidak banyak terjadi perubahan, yaitu pemeluk agama Islam sekitar 98%, kemudian pemeluk agama Kristen Protestan 1,23%, pemeluk agama Kristen Katolik sebesar 0,29%, agama Hindu 0,09% dan agama Budha sebesar 0,12%. Berdasarkan perhitungan di tahun 2007, realisasi jumlah kelompok seni dan budaya yang ada sebanyak 477 kelompok atau meningkat sebanyak 174 kelompok dibandingkan tahun 2003. Meningkatnya jumlah kelompok seni dan

budaya ini mengindikasikan adanya peningkatan perhatian masyarakat terhadap seni dan budaya.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menggambarkan capaian keseluruhan dalam suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf), serta tingkat standar hidup (paritas daya beli). Pada empat tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari 68,4 pada tahun 2004 menjadi 70,21 pada tahun 2007. Nilai IPM sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 yang disebabkan adanya penurunan paritas daya beli akibat naiknya inflasi yang dipicu kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005, namun kembali mengalami kenaikan setelah tahun 2006. Dari ketiga komponen IPM, kontribusi terbesar berasal dari Indeks Pendidikan, dan kontribusi terkecil berasal dari Indeks Daya Beli. Nilai IPM di Kabupaten Jombang lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur maupun rata-rata IPM Nasional.

#### **4.1.3. Prasarana dan Sarana**

Pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana daerah yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pelayanan air minum, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan



sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan daerah ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Jombang terletak di wilayah yang sangat strategis dalam jalur transportasi utama, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya–Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang – Babat, serta termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus. Akses transportasi ke ibukota kecamatan seluruhnya telah dapat dijangkau dengan transportasi darat. Untuk mendukung kelancaran transportasi, di Kabupaten Jombang terdapat satu terminal induk sebagai simpul utama dan tiga sub terminal untuk kendaraan angkutan perdesaan yang menghubungkan Jombang dengan kota kecamatan, yang dilayani oleh 25 trayek angkutan perdesaan dengan jumlah kendaraan kurang lebih 404 kendaraan. Jumlah ini ditambah juga dengan adanya trayek angkutan antar kota sebanyak enam trayek yang menghubungkan kota Jombang dengan kabupaten sekitarnya. Sampai dengan tahun 2007, panjang jalan mencapai 1.096,96 Km, permukaan jalan tersebut sebagian besar sudah diaspal, yaitu sepanjang 956,95 Km dan permukaan makadam sepanjang 60,73 Km, sedangkan permukaan tanah sepanjang 79,29 Km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut, sebagian besar (82,00%) atau sepanjang 523,120 Km adalah jalan kelas III C, sepanjang 103,146 Km adalah jalan Kelas I dan sepanjang 11,700 Km adalah Jalan Kelas II. Keadaan jalan dengan kondisi baik hanya sebesar 37,53% dari jalan



yang ada atau sepanjang 359,107 km. Sedangkan keadaan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 448,984 km, kondisi rusak sepanjang 148,855 km.

## **4.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang**

### **4.2.1. Profil Bappeda Kabupaten Jombang**

(Bappeda) Kabupaten Jombang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati di bidang perencanaan, pengembangan, dan penelitian pembangunan di Kabupaten Jombang.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, Bappeda Kabupaten Jombang menjadikan internet sebagai wahana penyebarluasan informasi dalam menciptakan transparansi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang sekaligus mencoba menghimpun berbagai kritik dan saran dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Jombang melalui media interaktif yang tersedia.

### **4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang merupakan lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perencanaan, pengembangan dan penelitian pembangunan

Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bappeda memiliki fungsi:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) di bawah Sekretaris Daerah
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Instansi-instansi Vertikal di Kabupaten Jombang
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut
- Penyusunan dan pengembangan struktur wilayah dan pelaksanaan rencana tata ruang
- Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang-bidang pembangunan Daerah serta administrasi publik
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### 4.2.3. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Kabupaten Jombang

Visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah: “Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komprehensif, dan akuntabel”

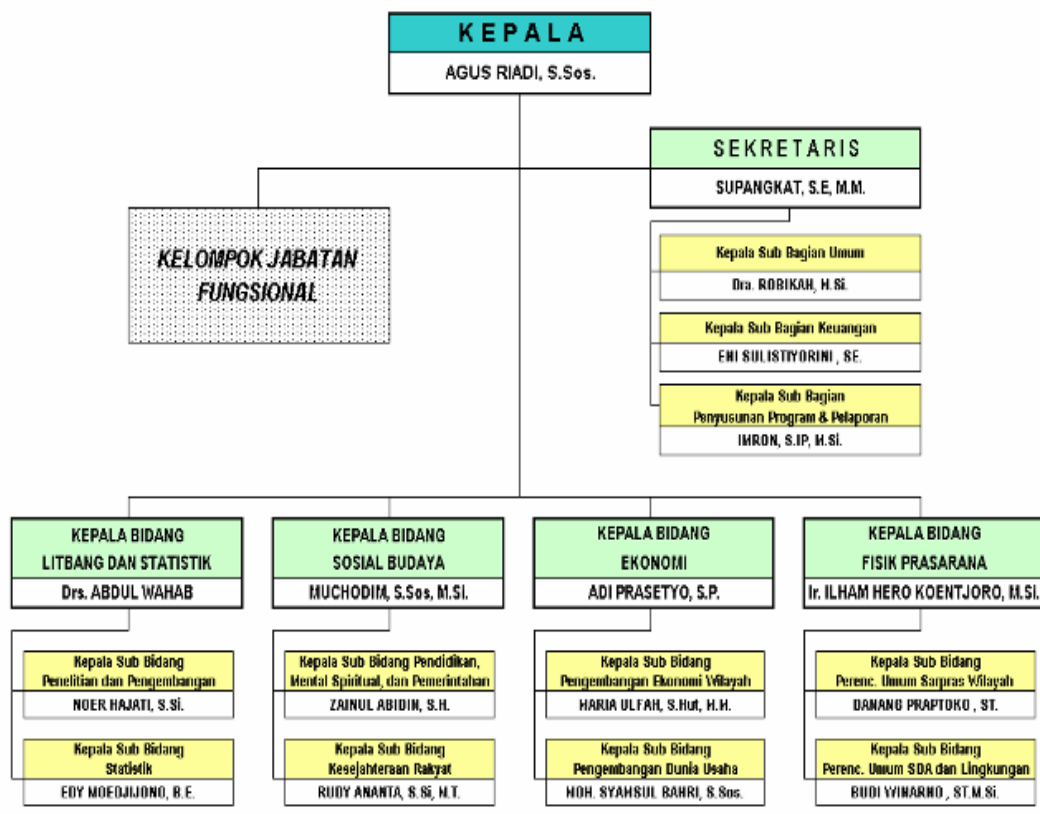
Misi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah:

1. Mewujudkan sistem dan manajemen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Memberdayakan potensi lokal, penelitian, dan pengembangan bidang-bidang pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur perencana yang responsif terhadap kepentingan masyarakat



Struktur Organisasi :

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Jombang



Sumber: Bappeda Kab. Jombang

4.2.4. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2007, Bappeda Kabupaten Jombang memiliki 40 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan



**Tabel 4.1. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Golongan I	0 orang
Golongan II	4 orang
Golongan III	31 orang
Golongan IV	5 orang

Sumber: Bappeda Kab. Jombang

Komposisi Menurut Jabatan

**Tabel 4.2. Komposisi Menurut Jabatan**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	8 orang
Staf	24 orang
Fungsional*	3 orang

\*) 2 orang fungsional perencana dan 1 orang fungsional peneliti

Sumber: Bappeda Kab. Jombang

## Komposisi Menurut Pendidikan

**Tabel 4.3. Komposisi Menurut Pendidikan**

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	2 orang
Diploma (D3)	1 orang
Sarjana (S1)	26 orang
Magister (S2)	11 orang

Sumber: Bappeda Kab. Jombang

### 4.3. Penyajian Data Fokus Penelitian

#### 4.3.1. Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Prastyo SP selaku Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 2 Mei 2011 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, adalah:

secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Jombang yang relatif stabil. Struktur ekonomi Kabupaten Jombang bertumpu pada empat sektor utama yang secara tradisional menyangga ekonomi sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Keempat sektor tersebut adalah :

1. Pertanian
2. Perdagangan, hotel, dan restaurant
3. Industri Pengolahan
4. Jasa-jasa baik pemerintah maupun swasta.

Laju pertumbuhan empat sektor utama ekonomi Kabupaten Jombang 2010 terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 8,74% yang kemudian disusul oleh jasa-jasa sebesar 6,96% kemudian pertanian dengan 5,54%. Sementara industri berada pada urutan terakhir pertumbuhannya yakni 4,40%. Sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa yang pertumbuhannya mampu mengalami lonjakan cukup jauh yakni 2,03% untuk pertanian, 2,23% untuk industri pengolahan dan 2,11% untuk jasa-jasa. Sementara sektor perdagangan relatif stabil.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009, tetapi ternyata perekonomian Kabupaten Jombang masih bisa bangkit, bahkan mencapai puncak pada tahun 2010 dari sepuluh tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang yang memperkuat ekonomi kerakyatan yakni pertanian, dan perdagangan informal dan koperasi yang menjadi tumpuan nafkah sebagian besar masyarakat.

#### a. Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala usaha yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup dimana hasilnya akan digunakan memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi saja. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor pertanian meliputi: sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan rakyat, tanaman perkebunan besar, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, perikanan dan jasa pertanian.

- 1. Tanaman Bahan Makanan** Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain, serta hasil-hasil produk ikutannya.
- 2. Tanaman Perkebunan.** Tanaman perkebunan terdiri dari dua jenis, yaitu:  
**Tanaman Perkebunan Rakyat** Komoditi yang dicakup pada sub sektor ini antara lain adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mente, kelapa, kopi, kapuk, kapas, tebu, tembakau, dan cengkeh. Cakupan tersebut termasuk produk ikutannya dan hasil-hasil

pengolahan sederhana seperti minyak kelapa rakyat, tembakau olahan, dan teh olahan.

**Tanaman Perkebunan Besar** Untuk sub sektor tanaman perkebunan besar yang kegiatannya mencakup produksi komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perkebunan seperti karet, teh, kelapa, kopi, kapuk, kapas, tebu, coklat, kelapa sawit dan cengkeh, serta tanaman lainnya.

**3. Peternakan Dan Hasil-Hasilnya** Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun hasil ternak, seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, susu segar, dan telur. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong di luar rumah potong hewan (RPH) ditambah perbedaan stok populasi ternak dan ekspor ternak neto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan telur, serta harganya diperoleh dari Sub Dinas Peternakan.

**4. Kehutanan.** Sub sektor ini mencakup kegiatan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya, dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu, sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa gondorukem, kopi, kelapa, ulat sutera, dan madu. Data produksi dan harga perdagangan besar yang diperoleh dalam sub sektor kehutanan diperoleh dari dinas kehutanan.

**5. Perikanan.** Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan umum, tambak, kolam, dan keramba baik ikan konsumsi maupun ikan hias serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

Tabel 4.4

Hasil Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2006-2010 (dalam juta Rupiah)

Pertanian	Tanaman bahan makanan	Tanaman Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan
2006	1.675.264,66	355.868,75	507.739,31	62.834,35	26.144,58
2007	2.906.070,16	411.264,71	570.054,42	71.509,79	29.521,84
2008	2.144.221,74	474.793,15	668.657,28	83.188,13	32.954,93
2009	2.336.348,34	521.906,98	720.694,86	92.822,10	32.542,41
2010	2.567.965,57	588.554,96	784.190,94	105.445,04	36.320,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### b. Pertambangan dan Penggalian

Komoditi yang dicakup dalam sektor ini adalah penggalian pasir, penggalian batu kerikil, dan tanah urug. Data produksi dan nilai produksi diperoleh dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik berupa data primer dan data sekunder.

Tabel 4.5

Hasil Produksi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Jombang tahun 2006-2010 (dalam juta rupiah)

Pertambangan Penggalian	Pertambangan Migas	Pertambangan Non migas	Penggalian
2006	-	107.883,36	22.080,30
2007	-	120.336,41	23.806,74
2008	-	135.195,55	27.398,45
2009	-	147.089,93	30.126,74
2010	-	161.079,67	32.251,05

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang



### c. Industri Pengolahan.

Sektor ini terdiri dari dua sub sektor, yaitu Sub sektor industri besar/ sedang, dan sub sektor industri kecil termasuk RPH (Rumah Potong Hewan) dan kerajinan rumahtangga. Data output atas dasar harga berlaku diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Output dan nilai tambah sub sektor Industri Kecil Kerajinan Rumahtangga diperoleh dengan pendekatan produksi, yaitu dengan mengalikan rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, sedang output RPH diperoleh dari pengolahan laporan RPH triwulanan oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 4.6

Hasil Produksi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2006-2010 (dalam Juta Rupiah)

Sektor	Industri Pengolahan
2006	1.057.751,25
2007	1.197.866,88
2008	1.362.774,55
2009	1.487.150,16
2010	1.637.899,65

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

### d. Listrik, Gas, dan Air bersih

Sektor ini meliputi tiga sub sektor yaitu sub sektor listrik, sub sektor gas dan sub sektor air bersih. Sejauh ini kegiatan pada sub sektor gas di Kabupaten Malang belum ada sehingga yang dibahas pada sektor ini hanya sub sektor listrik dan sub sektor air bersih.

1. **Listrik** Sub sektor ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diusahakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun non-PLN

dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri. Metode penghitungan yang dilakukan untuk sub sektor ini adalah pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto diperoleh dari nilai output dikurangi biaya antara.

2. Kegiatan sub sektor ini mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum serta pendistribusian dan penyalurannya melalui pipa dan alat lain ke rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maupun bukan PDAM. Metode penghitungan yang digunakan seperti pada sub sektor listrik yaitu pendekatan produksi. Nilai produksi dan harga diperoleh dari PDAM. Penghitungan Nilai tambah bruto baik berlaku maupun konstan sama seperti penghitungan sub sektor listrik.

Tabel 4.7

Hasil Produksi Sektor Listrik, Air, dan Gas Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010  
(dalam juta Rupiah)

Air, Listrik, Gas	Air	Listrik	Gas
2006	1.593,76	102.254,85	-
2007	1.793,53	109.906,02	-
2008	2.094,51	121.453,26	-
2009	2.316,56	126.440,09	-
2010	2.556,54	135.041,22	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### e. Bangunan

Sektor Bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, dam irigasi dan sebagainya. Nilai tambah Bruto dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan

nilai pembangunan prasarana fisik yang dibiayai APBN maupun APBD serta perbaikannya dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh developer, BTN, REI dan swadaya masyarakat murni dan biaya antara sub sektor sewa bangunan.

Tabel 4.8

Hasil Produksi Sektor Bangunan Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Sektor Bangunan
2006	209.145,86
2007	228.526,34
2008	298.920,19
2009	319.771,82
2010	355.958,37

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### f. Perdagangan, Restoran, dan Perhotelan

Sektor ini terdiri dari tiga sub sektor yaitu perdagangan, sub sektor hotel dan sub sektor restoran. Pada dasarnya kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan perdagangan, penyediaan akomodasi/hotel, serta penjualan makanan dan minuman seperti restoran, warung makan, kedai, pedagang keliling dan sejenisnya.

- 1. Perdagangan Besar dan Eceran** Perhitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku sub sektor perdagangan besar dan sedang dilakukan dengan pendekatan arus barang (comodity flow). Produk Luar daerah dihitung dengan pendekatan kosumsi rumah tangga dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung berdasarkan metode deflasi yaitu IHK kelompok Umum sebagai deflatornya.



2. **Hotel** Kegiatan sub sektor ini mencakup semua Hotel, Penginapan, dan yang sejenisnya. Output diperoleh dari survei VHTL setiap tahun yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan rasio nilai tambah diperoleh dari hasil survey khusus. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metode deflasi dengan IHK Kelompok Makanan Kabupaten Jombang sebagai deflatornya.

3. **Restoran** Kegiatan sub sektor restaurant mencakup usaha kegiatan penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan baik dengan tempat tetap maupun tidak tetap, termasuk perdagangan makanan/minuman keliling.

Tabel 4.9

Hasil Produksi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 (dalam juta Rupiah)

Sektor	Perdagangan	Hotel	Restoran
2006	2.588.142,26	6.967,75	343.160,46
2007	2.992.735,62	7.449,23	381.158,36
2008	3.551.355,64	8.396,07	294.687,56
2009	3.958.146,05	9.105,72	326.251,94
2010	4.432.332,51	9.810,88	330.868

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### g. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang melalui darat, laut, sungai/danau, dan udara baik bermotor maupun tidak bermotor. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

1. **Angkutan Jalan Raya** Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor

ataupun tidak bermotor seperti bus, truk, *pick up*, *colt*, ojek, dokar, dan sebagainya.

2. **Jasa Penunjang Angkutan** Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar/muat, penyimpanan dan pergudangan, serta jasa penunjang angkutan lainnya.

3. **Komunikasi** Kegiatan yang dicakup meliputi jasa pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi.

a. **Pos dan Giro** Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan, dan sebagainya. Termasuk disini pemberian jasa kepada pihak ke tiga seperti jasa giro, tabungan pos, penjualan kertas berharga dan lainnya yang diusahakan oleh PT Pos dan Giro.

b. **Telekomunikasi.** Kegiatan ini mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegram, faksimili, dan teleks.

c. **Jasa Penunjang Komunikasi** Kegiatan sub sektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi seperti wartel, kios pon, warpostel, radio pager, telepon seluler (ponsel).

Tabel 4.10

Hasil Produksi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 (dalam Juta Rupiah)

Sektor	Angkutan	Pos dan Telekomunikasi	Jasa Penunjang Komunikasi
2006	202.912,14	128.479,07	4.536,29
2007	218.057,47	149.100,41	4.609,96
2008	255.734,74	152.892,85	4.699,13
2009	280.477,13	185.055,46	5.143,73
2010	307.115,96	194.579,82	5.148,46

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### h. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi sub sektor bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.

- 1. B a n k** . Angka nilai tambah bruto sub sektor Bank atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 diperoleh berdasarkan alokasi dari BPS Propinsi Jawa Timur yang bersumber dari laporan Bank Indonesia Pusat. Dalam PDRB seri terbaru ini, nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari kegiatan Bank Indonesia tidak mencakup pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pinjaman dari luar negeri, karena hal itu merupakan kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersial perbankan, sedangkan pada PDRB seri lama masih mencakup kedua jenis bunga tersebut.
- 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank** Kegiatan lembaga Keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi, pegadaian dan sebagainya.



**3. Sewa Bangunan** Sektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan sebagai tempat tinggal rumahtangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri atau disewa.

**4. Jasa Perusahaan.** Sub sektor ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan, fotokopi, jasa persewaan alat-alat pesta, dan sebagainya.

Tabel 4.11

Hasil Produksi Sektor Keuangan dan Persewaan Kabupaten Jombang tahun 2006-2010 (Dalam Juta Rupiah)

Sektor	Bank	Lembaga Keuangan bukan bank	Sewa Bangunan	Jasa Perusahaan
2006	55.568,23	55.220,37	190.946,28	15.994,63
2007	64.597,57	63.206,34	216.557,28	17.589,16
2008	77.271,24	72.462,77	249.302,11	19.899,96
2009	86.799,21	79.580,67	278.877,73	21.668,79
2010	96.481,77	88.155,67	305.150,49	23.490,12

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

#### i. Jasa-Jasa

Sektor ini dibagi menjadi dua sub sektor yaitu: sub sektor jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Sub sektor jasa pemerintahan umum meliputi jasa pemerintahan, administrasi pemerintahan, dan pertahanan keamanan. Sub sektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, dan jasa perorangan rumah tangga.

**1. Jasa Pemerintahan Umum** . Nilai tambah bruto sub sektor jasa pemerintahan umum terdiri dari jumlah upah dan gaji rutin pegawai

pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar 5 persen dari total gaji yang telah dihitung.

**2. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan** Sub sektor ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, dan rumah ibadat. Kegiatan-kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan hanya terbatas yang dikelola diluar pemerintah. Sedang kegiatan sejenis yang dikelola pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan. Penghitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Jasa Pendidikan** Perkiraan output sektor ini adalah perkalian antara murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan yang datanya diperoleh dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan biaya pendidikan selama satu tahun untuk masing-masing jenjang pendidikan yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

**b. Jasa Kesehatan** Sub sektor jasa kesehatan mencakup jasa rumah sakit swasta, rumah bersalin, dokter praktek, dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta.

**c. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya** Output/nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengalikan jumlah anak yang diasuh dengan rata-rata outputnya. Data jumlah anak asuh diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Demikian pula untuk rumah ibadah, data rata-rata

input rumah ibadah dikalikan dengan jumlah tempat ibadah di Kabupaten Jombang

**3. Hiburan dan Kebudayaan.** Sub sektor ini mencakup tempat rekreasi, televisi swasta, radio swasta, rumah biliar, dan sebagainya. Output tempat rekreasi diperoleh dari rekap laporan triwulanan tempat rekreasi di Kabupaten Jombang selama satu tahun, output rumah biliar merupakan perkalian antara jumlah meja biliar dengan rata-rata output per meja biliar yang diperoleh dari survei yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk output dari panggung kesenian serta tontonan lainnya diperoleh dengan membagi realisasi pajak tontonan dari Dinas Pendapatan Daerah dengan persentase ketentuan penarikan pajak, sedangkan untuk televisi swasta dan radio swasta output diperoleh dari perkalian antara banyaknya perusahaan radio swasta di Kabupaten Jombang dengan rata-rata output per perusahaan yang diperoleh dari survei khusus.

**4. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.** Sub sektor ini meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga yang terdiri antara lain, jasa perbengkelan, reparasi, jasa pembantu rumah tangga dan jasa perorangan lainnya.



Tabel 4.12

Hasil Produksi Sektor Jasa-Jasa PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jombang tahun 2006-2010 (dalam juta rupiah)

Sektor	Adm. Pemerintahan dan Pertahanan	Sosial Kemasyarakatan	Hiburan dan Kebudayaan	Perorangan dan Rumah tangga
2006	499.379,82	197.986,20	8.106,03	139.617,38
2007	559.152,48	229.900,02	9.538,91	159.027,67
2008	644.289,37	394.590,86	10.942,88	202.629,59
2009	709.234,06	451.241,82	12.052,64	230.653,68
2010	777.127,12	515.322,03	13.284,46	256.019,84

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang

### 4.3.2. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang

#### 4.3.2.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang

##### 1. Strategi Pembangunan Berdasarkan RPJP dan RPJM

Arah dan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang didasarkan dan ditetapkan berdasarkan pada RPJP Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Dalam melakukan pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Jombang telah menentukan visi dan misi pembangunan seperti yang termuat dalam RPJP Kab. Jombang Tahun 2005-2025.

Pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang dalam 20 tahun ke depan dalam menunjang perwujudan menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sentra agrobisnis di Jawa Timur diarahkan untuk "*Mewujudkan struktur*

***perekonomian yang kokoh berbasis pertanian sebagai penggerak utama dan didukung keunggulan sektor pendukung***". Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berbasis pertanian sebagai penggerak utama dengan didukung keunggulan sektor pendukung ditempuh dengan:

- (1) Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan publik;
- (2) Pengembangan potensi wilayah, baik pada daerah sekitar hutan, persawahan, perikanan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- (3) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri yang memiliki daya saing global serta mampu memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas;
- (4) Membangun inkubator agribisnis dan agroindustri dan mengembangkan kawasan pusat-pusat pengembangan terpadu.

Untuk mewujudkan keempat strategi tersebut berdasarkan RPJP 2005-2025 ada tahap-tahap yang ditetapkan dengan sasaran pembangunan lima tahun. Tahap-tahap tersebut adalah:

### 1. Tahap Pertama (2005 - 2008)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, tahap pertama diarahkan untuk ***Penguatan Kelembagaan dan Sarana Agribisnis.***

### 2. Tahap Kedua (2009 - 2013)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis.***

### 3. Tahap Ketiga (2014 – 2018)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Memantapkan kawasan strategis dan mengembangkan produk potensi lokal yang berbasis agribisnis.***

### 4. Tahap Keempat (2019 - 2023)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, diarahkan untuk ***Mewujudkan keunggulan perekonomian berbasis agribisnis.***

### 5. Tahap Kelima (2024 - 2025)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, dilaksanakan untuk ***Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025.***



Kabupaten Jombang sekarang (Tahun 2011) telah memasuki tahap ke-2 dengan sasaran “*Menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agribisnis*”. Tahap ini ditujukan pada peningkatan produksi dan distribusi produk agribisnis yang diharapkan dapat mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum. Pada tahap kedua ini, pengembangan sebagai pusat agribisnis pada tahap ini diarahkan pada sentra sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, Pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis. Di samping itu, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur. Infrastruktur ditingkatkan dalam skala yang tinggi dan meletakkan

sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Sedangkan pada sektor perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan pasar dalam negeri, penataan distribusi barang.

Dalam aspek pengembangan wilayah, kesenjangan antar daerah dikurangi dengan pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang menjangkau keseluruhan daerah-daerah tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada.

Sejalan dalam pencapaian target tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan RPJM Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013. Dimana di dalam RPJM tersebut terdapat langkah-langkah strategi dan kebijakan makro untuk mencapai target "Menumbuhkan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang Berbasis Agribisnis". Seperti yang tertuang dalam Misi ke-3 Bab IV RPJM Kab. Jombang Tahun 2009-2013 yang disebutkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis adalah:

1. *Meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis, dengan sasaran-sasaran:*
  - a. Mantapnya ketahanan pangan, dengan indikator:

- (1) Terwujudnya stok pangan pada 500 poktan pada 2013;
- (2) Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 m/hari/orang;
- (3) Tercapainya nilai NTP sebesar 111 pada tahun 2013 (dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar).

b. Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh, dengan indikator:

- (1) Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian;
- (2) Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian tahun 2013;
- (3) Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis tahun 2013.

c. Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis, dengan indikator:

- (1) Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi pada sentra-sentra produksi;
- (2) Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis.

2. *Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis*, dengan sasaran-sasaran :

a. Meningkatnya investasi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan indikator:

- Meningkatnya jumlah unit usaha sebesar 3.140 dan nilai investasi sebesar Rp. 5.391.125.485 pada 2013.

b. Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien, dengan indikator:

- Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada 2013.

3. *Mewujudkan kawasan strategis cepat tumbuh berbasis agribisnis*, dengan sasaran:



- Terwujudnya klaster-klaster agribisnis di Kabupaten Jombang, dengan indikator:

- (1) Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh pada setiap SSWP pada 2013;
- (2) Terwujudnya keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha di bidang agribisnis dalam satu kawasan pada tahun 2013.

## **2. Strategi Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang merupakan dokumen makro arah pembangunan yang strategis. Dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Jombang tetap menjadi wilayah dengan mengandalkan pertanian sebagai prioritas. Sektor perkebunan dan kehutanan merupakan kegiatan eksisting yang telah berkembang dan akan dipertahankan di wilayah Kabupaten Jombang dan terus dikelola untuk menjadi bagian dari pengembangan agribisnis di wilayah Jombang.

Didasarkan pada sektor ekonomi unggulan berdasarkan PDRB Kabupaten Jombang ada empat jenis kegiatan yang akan dikembangkan dalam 20 tahun ke depan yakni:

### **A. Kegiatan Sektor Pertanian**

Komoditas pertanian tanaman pangan direncanakan meliputi komoditas padi dan tanaman hortikultura. Pengembangan tanaman padi direncanakan untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Jombang

dan mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di wilayah Jawa Timur.

Rencana kegiatan pertanian tanaman pangan dikembangkan di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Sumobito. Kegiatan disektor pertanian tanaman pangan khususnya padi akan didukung lahan pertanian sawah beririgasi teknis yang dikonservasi seluas 40,676 untuk mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di Jawa Timur.

Sedangkan untuk tetap mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Jombang hingga 20 tahun ke depan, minimal akan pengembangan tanaman padi akan diarahkan dilahan seluas minimal 27,125 ha. Luas lahan minimal tersebut ditetapkan sebagai luas lahan pertanian abadi di Kabupaten Jombang. Tanaman pangan hortikultura yang dikembangkan di kawasan pertanian lahan kering meliputi tanaman palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu.

Tabel 4.13

**Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Pertanian  
Di Kabupaten Jombang**

KEGIATAN PERTANIAN	KOMODITAS UNGGULAN	ARAH PENGEMBANGAN	WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN
Sub Sektor Tanaman Pangan	Padi	Pembentukan Sentra Beras	Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Sumobito
	Palawija : Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu	Kecukupan bahan baku untuk mendorong terbentuknya agroindustri.	Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Kabuh.

Sumber : Pengolahan Dan Analisa data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang

Berdasarkan Tabel 4.13 rencana pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan pada dua model pengembangan yakni pembentukan sentra beras dan kecukupan bahan baku untuk mendorong terbentuknya agroindustri. Sedangkan komoditas unggulan sub sektor tanaman pangan adalah padi dan palawija. Dengan demikian maka untuk kegiatan sektor pertanian difokuskan kepada sub sektor pangan.

**B. Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan**

Kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan yang direncanakan terus dikembangkan meliputi :

- Sub sektor kehutanan



□ Sub sektor perkebunan meliputi kegiatan budidaya tanaman komoditi perkebunan dan pengelolaan institusi perkebunan

Kegiatan sub sektor kehutanan diarahkan pada wilayah yang mempunyai kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Jombang seluas 12,82 % dari wilayah Kabupaten Jombang. Sedangkan hutan yang berada di tanah hak masyarakat (hutan rakyat) seluas 4,54 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang.

Hutan produksi di Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani yang meliputi hutan jati dan hutan rimba. Hutan jati dibudidayakan untuk diambil hasil kayunya, sedangkan hutan rimba dibudidayakan untuk diambil hasil hutan non kayu yang berupa getah pinus dan hasil hutan lainnya. Kawasan Hutan produksi sebagian ada yang ditanami tanaman buah-buahan seperti durian dan rambutan serta tanaman perkebunan dengan jenis komoditas tebu, kopi, cengkeh, kelapa, tembakau, dan mete.

Komoditas andalan kehutanan di Kabupaten Jombang yaitu berupa kayu jati, sedangkan untuk komoditas andalan sektor perkebunan yaitu berupa tanaman perkebunan berupa tanaman tebu, kakao, kelapa, kopi,

jambu mete, tembakau, cengkeh, dan tanaman toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan serai).

Kegiatan kehutanan yang dikembangkan di Kabupaten Jombang yaitu terdapat di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Sedangkan untuk kegiatan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Kudu dengan sektor kegiatan tanaman komoditas perkebunan berupa jambu mete, kelapa, kopi, tembakau dan kakao. Dimana rencana pengembangan kegiatan perkebunan direncanakan meliputi pengembangan kawasan perkebunan dan pengembangan komoditas perkebunan di lahan milik rakyat.

**Tabel 4.14**

**Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Jombang**

NO.	JENIS KEGIATAN	KOMODITAS UNGGULAN	ARAH PENGEMBANGAN	WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN
1	Kehutanan	Kayu Jati	Direncanakan sebagai kawasan peyangga dengan fungsi ekologis dan memiliki nilai ekonomis dan pengembangan agroforestry.	Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan.

NO.	JENIS KEGIATAN	KOMODITAS UNGGULAN	ARAH PENGEMBANGAN	WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN
2	Tanaman Perkebunan	Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Tembakau, Cengkeh, dan Tanaman Toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan serai).	Dikembangkan dengan membentuk agrowisata alam dan agroforestry yang berupa wisata buah dan memadukan kegiatan pelestarian dan pariwisata.	Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Kudu.

Sumber : Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Jombang 2009-2029

### C. Kegiatan Sektor Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 20 tahun mendatang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah Jombang lebih pesat. Kegiatan industri secara simultan direncanakan mempunyai kontribusi terhadap :

- Perkembangan perekonomian masyarakat Jombang melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
- Mendorong diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya potensi lokal khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang.
- Memberikan dampak berganda terhadap kegiatan di sektor perdagangan dan transportasi.



Struktur kegiatan industri di Kabupaten Jombang

meliputi :

- Industri pengolahan merupakan industri besar
- Industri manufaktur
- Agroindustri

1. Industri skala menengah dan besar :

Pengembangan kegiatan industri berdasarkan skala kegiatan meliputi kegiatan industri kecil, menengah dan besar. Kegiatan industri skala menengah hingga besar diarahkan dalam sebuah kawasan. Kegiatan industri skala menengah dan besar direncanakan berupa industri pengolahan dan industri manufaktur. Pengembangan kegiatan industri pengolahan skala besar diarahkan di Kecamatan Ploso. industri manufaktur menengah diarahkan di Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan kegiatan agroindustri di Kecamatan Mojowarno.

2. Rencana pengembangan kegiatan industri yang tergolong dalam kegiatan pendukung sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan (agroindustri) di Kabupaten Jombang :

- a. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang didorong untuk terus berkembang dalam kurun waktu 20 tahun menadatang. Wilayah pengembangan agroindustri diarahkan di

Kecamatan Mojowarno dan dikembangkan dalam bentuk cluster agroindustri.

b. Rencana Agroindustri yang didorong meliputi industri pendukung produksi pertanian, peternakan serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan tanpa limbah.

c. industri berupa industri penghasil peralatan pertanian tetap diarahkan di Bandarkedungmulyo dan industri pendukung produksi pertanian dan peternakan yang menghasilkan limbah kimia diarahkan tetap di Ploso

### 3. Kegiatan industri kecil

Beberapa industri kecil manufaktur yang dapat merambah pasar luar negeri dan nasional kembali didorong.

a. Industri kecil yang merambah pasar luar negeri adalah industri kerajinan manik-manik kaca (di Desa Plumbon-Gambang, Kecamatan Gudo) dan industri kerajinan cor kuningan (di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung). Kedua kerajinan tersebut adalah khas Kabupaten Jombang.

- b. Industri kecil lain yang dipasarkan di tingkat nasional antara lain adalah mebelair (di Kecamatan Mojowarno), anyaman tas (di Kecamatan Mojowarno), limun (di Kecamatan Bareng dan Kecamatan Ngoro), serta Kecap "Ikan Dorang", yang merupakan salah satu trade mark Jombang.

Kegiatan industri kecil direncanakan didorong melalui ketersediaan bahan baku, khususnya industri pengolahan bahan makanan seperti industri kecap. Sedangkan industri kecil manufaktur direncanakan bersinergi dengan industri skala besar.

4. Pengembangan kegiatan industri berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut : kegiatan Industri kimia polutif dan kegiatan industrilain yang memberikan dampak limbah yang mengganggu lingkungan diarahkan masuk di kawasan industrial estate, dengan pengelolaan limbah secara terpadu. Industri polutif tersebut diarahkan di Kecamatan Ploso. Sedangkan kawasan industri di Kecamatan Bandar Kedungmulyo diarahkan untuk kegiatan industri manufaktur yang ramah lingkungan.



#### D. Kegiatan Sektor Perdagangan dan Jasa Komersial

Struktur kegiatan sektor perdagangan di Kabupaten

Jombang meliputi :

- perdagangan Agribisnis
- perdagangan umum

Kegiatan sektor perdagangan yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan jenis kegiatannya meliputi perdagangan khusus agribisnis dan perdagangan kebutuhan. Kegiatan perdagangan agribisnis dikembangkan untuk mendukung pembentukan agropolitan di Kabupaten Jombang. Pusat kegiatan perdagangan agribisnis direncanakan dikembangkan di Kecamatan Mojowarno. Untuk mendukung kegiatan agribisnis dan khususnya untuk mendukung kegiatan perdagangan beras di Kabupaten Jombang dikembangkan Sub Terminal Agribisnis di Kecamatan Mojoagung.

Dalam rangka mendukung kegiatan pertanian subsektor peternakan, kegiatan pasar hewan diarahkan untuk tetap dikelola dan dikembangkan. Kabupaten Jombang memiliki 12 pasar hewan. Keberadaan pasar hewan tersebut dipertahankan. Pengembangan kegiatan pasar hewan skala regional diarahkan di dua tempat yaitu di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Ngoro.

Kegiatan perdagangan umum dalam skala kabupaten dikembangkan di Kecamatan Mojoagung. Rencana pengembangan skala kegiatan dikembangkan secara berhirarki berdasarkan hirarki dan orde perkotaan di wilayah Jombang.

Kegiatan perdagangan yang memberikan ciri khusus bagi Kabupaten Jombang dan berpotensi menjadi tujuan wisata seperti koridor warung pecel lele, lokasi perdagangan kerajinan khas Jombang dan perdagangan kecil lainnya difasilitasi untuk dikembangkan. Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan terdapat pada tabel 4.15.

**Tabel 4.15**  
**Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Perdagangan**  
**Di Kabupaten Jombang**

NO.	JENIS PERDAGANGAN	ARAH PENGEMBANGAN	PUSAT PENGEMBANGAN KEGIATAN	PENGEMBANGAN FASILITAS
1.	Agribisnis	Pusat distribusi pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta peternakan.	Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Kabuh	- Pasar Agribisnis
2.	Perdagangan umum skala regional	Perdagangan dipadukan dengan kegiatan distribusi dan koleksi lain dan membentuk kegiatan ekonomi terpadu.	Kecamatan Mojoagung	- Pasar Induk - Sub terminal Agribisnis Kabupaten - Pergudangan - Terminal kargo
3.	Perdagangan umum skala lokal	Konservasi perdagangan tradisional.	Tersebar di tiap kecamatan	- Pasar kecamatan

Sumber : Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Jombang 2009-2029

Berdasarkan pengelolaan dan aktivitasnya, kegiatan perdagangan di Kabupaten Jombang direncanakan sebagai berikut : Kegiatan perdagangan tradisional tetap

dipertahankan di kawasan perkotaan pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Kegiatan perdagangan modern dan semi modern termasuk kegiatan minimarket hanya dikembangkan di Pusat Pelayanan Kawasan. Sebanyak 17 pasar umum yang dikelola pemerintah direncanakan tetap dipertahankan sebagai pusat kegiatan perdagangan di kabupaten Jombang.

Pusat kegiatan perdagangan modern dan kegiatan perdagangan tradisional diarahkan minimal berjarak 3 kilometer. Kegiatan perdagangan modern skala besar termasuk pendirian Mall diarahkan hanya di perkotaan Jombang dan Perkotaan Tembelang. Pasara Tradisional di Perkotaan Jombang dalam perkembangannya diarahkan dalam bentuk pasar semi modern.

Kedudukan Kabupaten Jombang dalam Sistem dan Fungsi Perwilayahan RTRW Propinsi Jawa Timur menetapkan Kabupaten Jombang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Gerbangkertasusila Plus. Fungsi Wilayah Pengembangan Gerbangkertasusila Plus meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;

Didalam konstelasi penataan Wilayah Gerbangkertasusila Plus tersebut, Kabupaten Jombang merupakan wilayah untuk



pengembangan kegiatan Pertanian, Perdagangan, Industri. Dalam konstelasi tersebut Kabupaten Jombang mengambil peran pengembangan pertanian melalui penataan kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Jombang. Perdagangan diarahkan ke perdagangan agribisnis, dan bertumpu pula pada perdagangan pasar tradisional di kawasan pedesaan atau pasar kecamatan. Kegiatan industri diarahkan untuk industri pengolahan, industri manufaktur dan industri berbasis pertanian dan perkebunan. Sektor industri sangat penting bagi Kabupaten Jombang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun kedepan

Fokus pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Jombang meliputi pertanian tanaman pangan, khususnya padi, peternakan, pertanian komoditi perkebunan yaitu tanaman tebu. Pengembangan pertanian padi diarahkan untuk swasembada beras di Jombang dan menjadikan Jombang sebagai sentra beras di Jawa Timur.

Sedangkan sektor peternakan di Kabupaten Jombang diarahkan untuk untuk peternakan sapi potong, sapi perah, dan ayam potong. Tanaman tebu di kabupaten jombang dikembangkan di lahan pertanian sawah irigasi setengah teknis dan tegalan

Pengembangan fungsi perwilayahan pertanian, perdagangan dan industr di Kabupaten Jombang yang diarahkan oleh RTRW

Propinsi Jawa Timur tersebut, dijabarkan secara kewilayah di Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Pengembangan kegiatan pertanian diarahkan di 3 Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) yang tersebar di 5 Wilayah Pengembangan.
2. Perdagangan diarahkan berkembang di setiap kecamatan dan desa Pusat Pertumbuhan yaitu berbasis di pasar tradisional. Perdagangan skala regional di arahkan di Mojoagung, perdagangan agribisnis di arahkan berpusat di Agropolitan Center Mojowarno di SKPP I.
3. Kegiatan industri dikembangkan di Perkotaan Ploso untuk industri skala besar dengan menyediakan kawasan industri dan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan industri Bandarkedungmulyo sedangkan agroindustri berpusat di Perkotaan Mojowarno.

#### **4.3.2.2. Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis**

##### **1) Strategi Pembangunan Kawasan Agropolitan**

(Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi Prastyo SP selaku Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 2 Mei 2011) Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2009-2013 adalah pencapaian misi ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu misi yang akan dicapai adalah membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis dengan tujuan mewujudkan kawasan strategis cepat tumbuh berbasis agribisnis dengan sasaran terwujudnya klaster-klaster agribisnis di kabupaten Jombang.

Untuk mewujudkan misi RPJPD dan RPJMD maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang, dibuat rencana struktur ruang wilayah diantaranya



rencana sistem agropolitan. Pengembangan agropolitan di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) I, SKPP II dan SKPP III. SKPP I meliputi Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Mojowarno, SKPP II meliputi SSWP Mojoagung dan SKPP III meliputi SSWP Ploso. Namun untuk sekarang yang sedang dikerjakan adalah SKPP I yang meliputi SSWP Mojowarno.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Jombang, sistem kawasan agropolitan terdiri atas:

1. Kawasan Lahan Pertanian (hinterland)

Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dibidang ekonomi dan pelayanan lainnya.



## 2. Kawasan Pemukiman

Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentraproduksi pangan (agropolitan).

## 3. Kawasan Pengolahan dan Industri

Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Di kawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.

4. Kawasan Pusat Prasarana dan Pelayanan Umum yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.

5. Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya, kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Di dalam kawasan agropolitan Kegiatan agribisnis hulu dalam hal ini dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan di sektor pertanian yang menghasilkan barang-barang modal untuk kebutuhan produksi pertanian seperti industri perbenihan/pembibitan, industri agro-kimia (pupuk dan pestisida), industri agrootomotif (mesin dan peralatan produksi). Termasuk di dalamnya sumber daya energi seperti air sebagai

salah satu modal dalam melaksanakan proses produksi pertanian.

Dalam kegiatan agribisnis hulu Kegiatan *On-farm* di SKPP I yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Ngoro Luas lahan sawah 2998 Ha (irigasi teknis 2687 Ha) Desa Rejoagung 336 Ha. Komoditi tanaman pangan yang memberikan hasil paling besar di Kecamatan Ngoro adalah jenis tanaman padi dengan rata-rata produksinya 60,39 ton/ha.

Kecamatan Mojowarno Luas lahan sawah 3808 Ha (irigasi teknis 3808 Ha) Desa Japanan 781 Ha. Komoditi tanaman pangan yang memberikan hasil paling besar di Kecamatan Mojowarno adalah jenis tanaman jagung dengan rata-rata produksinya 235,92 ton/ha. Selain jagung, produksi yang besar lainnya adalah padi, hampir semua wilayah di Kecamatan Mojowarno menanam padi karena perawatannya yang mudah dan sederhana.

Kecamatan Bareng Luas lahan sawah 2549 Ha (irigasi teknis 2365 Ha) Desa Mundusewu 878 Ha. Komoditi tanaman pangan yang memberikan hasil paling besar di Kecamatan Bareng adalah jenis tanaman kedelai dengan rata-rata produksinya 120,7 ton/ha. Selain kedelai tanaman pangan dari jenis padi dan jagung juga menghasilkan produksi yang besar. Sehingga di Kecamatan Bareng banyak terdapat penggilingan

padi baik milik perorangan ataupun kelompok-kelompok tani. Untuk jenis tanaman ketela pohon juga memberikan hasil yang relatif besar, ketela pohon ini ditanam secara tumpang sari di sela-sela tanaman pohon jati. Komoditi tanaman sayuran yang memberikan hasil paling besar di Kecamatan Bareng adalah Terong dengan rata-rata produksinya 9,9 ton/ha.

Komoditi tanaman pangan yang memberikan hasil paling besar di Kecamatan Wonosalam adalah jenis tanaman Jagung dengan rata-rata produksinya 39,1 ton/ha. Kecamatan Wonosalam Luas lahan sawah 1367 Ha (irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis 678 Ha) Desa Wonomerto 156 Ha. Untuk meningkatkan hasil pertanian dan perlindungan terhadap petani di SKPP I setiap desa dan kecamatan membentuk kelompok tani. Hal ini untuk mempermudah pengawasan, pemberian penyuluhan dan pendistribusian bantuan-bantuan pertanian misalnya bantuan pupuk, benih ataupun modal. Dengan adanya kelompok tani juga bisa memberikan perlindungan terhadap hasil panen sehingga petani tidak akan dirugikan oleh tengkulak karena penjualan hasil pertanian dikoordinir oleh kelompok tani di daerah masing-masing.

Untuk menunjang kegiatan di kawasan agropolitan ada Beberapa kelembagaan SKPP I Kabupaten Jombang sebagai pendukung kegiatan pertanian antara lain:



### 1. BPP (Balai Pusat Pertanian)

BPP terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro dan di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng. BPP berfungsi sebagai balai pusat pertanian untuk petani-petani yang membutuhkan informasi dan bantuan mengenai pertanian.

### 2. BBI (Balai Benih Ikan)

Pelayanan penyaluran benih ikan unggul terdiri ikan lele, gurame, tombro, dan nila yang dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan Ngoro dan Bareng. Balai Benih Ikan (BBI) Ngoro merupakan sentra pembenihan ikan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah Kabupaten Jombang serta sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (tempat diklat dan magang).

### 3. UPR (Unit Pembenihan Rakyat)

Kebutuhan benih bagi petani ikan selain dicukupi dari Balai Benih Ikan juga ditunjang oleh keberadaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

### 4. P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya)

P4S adalah Pusat Pelatihan Pertanian Petani Swadaya yang terletak di Kecamatan Bareng. Balai ini sering

digunakan untuk memberi pelatihan-pelatihan kepada petani baik yang berasal dari Kecamatan Bareng maupun petani dari luar Kecamatan Bareng. Terpadu (SLPTT) dan pelatihan Poktan dan LMDH.

#### 5. Poskeswan

Adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan hewan maupun pencegahan penyakit hewan/ternak milik masyarakat. Poskeswan terdapat di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro yang tunjang dengan 1 Dokter Hewan dan 2 tenaga paramedis.

Pelayanan Kesehatan yang lain adalah:

a) Pelayanan Inseminasi Buatan;

b) Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan Ternak (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR).

#### 6. BRI (Bank Rakyat Indonesia)

BRI merupakan Bank milik pemerintah yang cabangnya sudah menjangkau hampir di setiap Kecamatan di Kabupaten Jombang. Sebagai Bank pemerintah yang satu-satunya ada di IKK (Ibukota Kecamatan) maka BRI banyak dijadikan sarana untuk melakukan transaksi keuangan baik penyimpanan

maupun peminjaman. Di SKPP I bank BRI terdapat di Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng dan Wonosalam.

#### 7. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank milik swasta. Bank ini juga sebagai tempat transaksi keuangan baik simpan maupun pinjam. Sehingga banyak dijadikan penduduk untuk mendapatkan bantuan modal. Di SKPP I Jombang BPP ada di Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng dan Wonosalam.

#### 8. Koperasi

Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro. Koperasi juga dijadikan tempat sebagai simpan pinjam uang.

#### 9. KUD (Koperasi Unit Desa)

KUD merupakan Koperasi Unit Desa yang ada di setiap desa SKPP I Jombang yang dikelola oleh desa. KUD berfungsi sebagai lembaga keuangan (peminjaman modal skala kecil atau 1 KUD melayani 1 desa) dan juga sebagai sarana untuk pertanian, misalnya dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah hasil panen.



## 10. KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat)

Koperasi ini merupakan perkumpulan petani-petani tebu SKPP I Jombang, mereka membentuk KPTR ini dengan maksud agar petani tebu terayomi/terlindungi serta mempermudah dalam permodalan, pengadaan pupuk, pengelolaan dan penjualan tebu.

Selain dari lembaga-lembaga pendukung tersebut, didalam kawasan agropolitan juga terdapat infrastruktur penunjang agrobisnis yakni:

### 1. Pasar Hewan

Pasar hewan di SKPP I Jombang terdapat di Kecamatan Ngoro yaitu di Desa Kauman beroperasi tiap pasaran tanggal Jawa yaitu legi dan di Desa Sidowareg yang beroperasi tiap pon. Hewan yang dijual di pasar hewan selain dari dalam Kabupaten Jombang sendiri juga dari luar daerah yaitu dari Pare, Kediri dan Lamongan.

### 2. RPH (Rumah pemotongan Hewan)

RPH di SKPP I hanya terdapat di Kecamatan Ngoro dan Bareng, namun tingkat produksinya kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging masih

mengandalkan dari RPH Candi di Kecamatan Jombang.

### 3. RPU (Rumah Potong Unggas)

Untuk pengolahan unggas tersedia fasilitas RPU di SKPP I terdapat di Desa Mojotengah, yang memiliki kapasitas 3 ton/hari.

## 2) Pengembangan Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Potensi Agrobisnis di SKPP I (SSWP Mojowarno)

### 1. Rencana Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan Sektor pertanian tanaman pangan di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman pangan. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Stable Growth Strategy* yaitu Strategi stabilisasi pertumbuhan untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Grobogan, Japaran, Mojowangi, Mojoduwur, Mojojejer, Mojowarno, Latsari, Mojotengah, Kertorejo, Kesamben, Nglebak, Tebel, Ngrimbi, Penggaron, Banjaragung, Bareng dan Pulosari.

#### a. Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Pangan

Jenis komoditi yang dikembangkan di SKPP I untuk sektor pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai.

### **b. Rencana Lokasi Pengembangan Tanaman Pangan**

Rencana lokasi pengembangan sektor tanaman pangan yang terdiri dari komoditi Padi, Jagung dan Kedelai direncanakan di Cluster tanaman pangan (Desa Grobogan, Mojowangi, Japanan, Mojoduwur, Mojojejer, Mojowarno, Latsari, Mojotengah, Kertorejo, Kesamben, Nglebak, Tebel, Pulosari, Ngrimbi, Penggaron, Banjaragung, Bareng). Lokasi clustertanaman pangan ini ditetapkan sebagai lahan abadi di SKPP I Kabupaten Jombang dengan luas 9022,18 Ha, sebagai pendukung program ketahanan pangan.

### **c. Agroindustri Yang Mampu Dikembangkan**

Kegiatan agroindustri yang mampu dikembangkan dari komoditi unggulan Padi dapat berupa home industry tepung beras, untuk skala besar dapat dikembangkan pengemasan beras untuk bisa langsung dijual ke pasaran. Untuk komoditi jagung bisa dikembangkan berupa pengolahan beras jagung dan gula jagung. Pengembangan komoditi kedelai bisa dikembangkan home industry susu kedelai.

### **d. Lokasi Agroindustri**

Pengembangan home industry tepung beras, beras jagung direncanakan di daerah Hinterland cluster tanaman pangan (Desa Grobogan, Mojowangi, Japanan, Mojoduwur, Mojojejer, Mojowarno, Latsari, Mojotengah, Kertorejo,



Kesamben, Nglebak, Tebel). Untuk lokasi agroindustri skala besar berupa gula jagung, pengemasan padi, kedelai dan jagung serta pembuatan susu kedelai direncanakan di Sub Agropolitan Center di Desa Bareng.

#### **e. Rencana Peranserta Masyarakat**

Peranserta masyarakat Kawasan Agropolitan SKPP I dalam pengembangan agribisnis tepung beras, beras jagung, susu kedelai, gula jagung dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok home industry gula jagung, Koperasi Petani.

#### **f. Rencana Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kawasan Agropolitan SKPP I berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor serta PTP yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk.

### g. Rencana Permodalan

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan *warehouse receipt* (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

## 2. Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Sayur

Pengembangan Sektor pertanian tanaman sayur di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan

sektor tanaman sayur. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Genukwatu, Badang dan Jombok.

#### **a. Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Sayur**

Jenis komoditi yang dikembangkan di SKPP I untuk sektor pertanian tanaman sayur adalah komoditi tomat, cabai dan terong.

#### **b. Rencana Lokasi Pengembangan Tanaman Sayur**

Lokasi pengembangan tanaman sayuran adalah seluruh desa hinterland yang termasuk ke dalam cluster agribisnis tanaman sayuran. Rencana pengembangan tanaman sayuran yang terdiri dari komoditi tomat, bawang merah, cabai dan terong direncanakan di Cluster tanaman sayuran (Desa Genukwatu, Desa Badang dan Desa Jombok).

#### **c. Agroindustri Yang Mampu Dikembangkan**

Kegiatan agroindustri yang mampu dikembangkan dari komoditi cabai dapat berupa home industry saos cabai dan bubuk cabai kemasan, untuk komoditi tomat dapat dikembangkan menjadi home industry saos tomat dan manisan tomat kering, sedangkan untuk bawang merah dapat dikembangkan menjadi home industry bawang merah



goreng kemasan, untuk tanaman terong karena sifatnya yang tidak bisa tahan lama maka hanya dapat digunakan sebagai sayuran untuk sehari-hari.

#### **d. Lokasi Agroindustri**

Pengembangan home industry saos cabai, saos tomat, manisan tomat dan cabai bubuk kemasan direncanakan di daerah Hinterland cluster tanaman sayuran (Desa Genukwatu). Untuk lokasi agroindustri bawang goreng kemasan direncanakan di daerah Hinterland cluster tanaman sayuran (Desa Genukwatu Jombok dan Badang).

#### **e. Rencana Peranserta Masyarakat**

Peranserta masyarakat Kawasan Agropolitan SKPP I dalam pengembangan agribisnis saos cabai, saos tomat, manisan tomat dan cabai bubuk dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok home industry dan Koperasi Petani.

#### **f. Rencana Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kawasan Agropolitan SKPP I berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah kegiatan saprotan dan alsintan, permodalan sarana-sarana strategis, pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan

group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk.

#### **g. Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman sayur;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan *warehouse receipt* (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern).

### 3. Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Buah

Pengembangan Sektor pertanian tanaman buah di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman buah. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Panglungan.

#### a. Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Buah

Jenis komoditi yang dikembangkan di SKPP I untuk sektor pertanian tanaman buah adalah durian.

#### b. Rencana Lokasi Pengembangan Tanaman Buah

Lokasi pengembangan tanaman buah adalah seluruh desa hinterland yang termasuk ke dalam cluster agribisnis tanaman buah Rencana pengembangan tanaman buah yang terdiri dari komoditi durian direncanakan di Cluster tanaman buah (Desa Panglungan).

#### c. Agroindustri Yang Mampu Dikembangkan

Pada tahun pertama, kedua dan ketiga prioritas pengembangan komoditas buah-buahan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi terutama dilakukan pada lahan tegalan dengan mengintroduksi sistem budidaya organik. Ekstensifikasi dilakukan pada



daerah-daerah yang secara eksisting telah terdapat pertanaman buah-buahan. Prioritas pengembangan agribisnis buah-buahan pada tahun keempat lebih diarahkan untuk penanganan proses pasca panen agar kualitas tanaman buah-buahan meningkat dan seragam. Pada tahun kelima dilakukan konsolidasi koperasi/kelompok tani buah dalam masyarakat agribisnis SKPP I untuk pendirian home industry dodol dari durian dan selei durian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Pada tahun-tahun selanjutnya pengembangan aspek pemasaran dan distribusi perlu direncanakan dengan portofolio produk dalam perluasan pasar.

#### **d. Lokasi Agroindustri**

Pengembangan *home industry* dodol durian dan sari minuman rasa durian direncanakan di daerah Hinterland cluster tanaman buah-buahan (Desa Panglungan).

#### **e. Rencana Peranserta Masyarakat**

Peranserta masyarakat SKPP I dalam pengembangan agribisnis tanaman buah-buahan dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan home industry dodol durian, selei durian, Asosiasi Pengusaha Produk Sekunder Buah (APPSB) dalam pemasaran, Koperasi Petani Tanaman Buah (KOPB). KOPB merupakan

representatif masyarakat agribisnis komoditas tanaman buah-buahan di SKPP I Kabupaten Jombang.

#### **f. Rencana Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan SKPP I berorientasi pada pengembangan sosial kapital, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV) atau Koperasi Masyarakat Agribisnis Terintegrasi Vertikal (KOMATVA). Kemitraan model lain adalah Korporasi Masyarakat Agribisnis (KOMA). KOMATVA atau KOMA bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor Yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk agroindustri (Based On Market).

#### **g. Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman buah;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

#### **4. Pengembangan Sektor Perkebunan Tanaman Tahunan**

Pengembangan Sektor pertanian tanaman tahunan di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman tahunan. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Galengdowo, Wonomerto, Carangwulung, Sambirejo dan Desa Jarak.

##### **a. Jenis Komoditi Perkebunan Tanaman Tahunan**

Jenis komoditi yang dikembangkan di SKPP I untuk sektor perkebunan tanaman tahunan adalah cengkeh, nilam dan kopi.



## **b. Rencana Lokasi Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan**

Lokasi pengembangan perkebunan tanaman tahunan adalah seluruh desa hinterland yang termasuk ke dalam cluster agribisnis perkebunan tanaman tahunan. Rencana pengembangan perkebunan tanaman tahunan yang terdiri dari komoditi cengkeh, kopi dan nilam direncanakan di Cluster perkebunan tanaman tahunan (Desa Desa Galengdowo, Wonomerto, Carangwulung, Desa Sambirejo, Desa Jarak).

## **c. Agroindustri Yang Mampu Dikembangkan**

Kegiatan agroindustri yang mampu dikembangkan dari komoditi cengkeh dapat berupa home industry penyulingan cengkeh untuk minyak cengkeh dan untuk bahan campuran rokok. Untuk komoditi kopi dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan kopi bubuk, minuman rasa kopi, essence kopi, komoditi nilam dapat dikembangkan menjadi minyak nilam yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan parfum.

## **d. Lokasi Agroindustri**

Lokasi home industry kopi direncanakan di daerah Hinterland cluster perkebunan tanaman tahunan (Desa Carangwulung), untuk home industry cengkeh di daerah Hinterland cluster perkebunan tanaman tahunan (Desa

Sambirejo), sedangkan untuk lokasi home industry nilam direncanakan di daerah Hinterland cluster perkebunan tanaman tahunan (Desa Jarak).

#### **e. Rencana Peranserta Masyarakat**

Peranserta masyarakat SKPP I dalam pengembangan agribisnis perkebunan tanaman tahunan dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi. Rencana pengembangan agribisnis perkebunan tanaman tahunan melalui jalur kelembagaan: terutama diarahkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah berjalan dengan baik seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan home industry.

#### **f. Rencana Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan SKPP I berorientasi pada pengembangan sosial kapital, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV) atau Koperasi Masyarakat Agribisnis Terintegrasi Vertikal (KOMATVA). Kemitraan model lain adalah Korporasi Masyarakat Agribisnis (KOMA). KOMATVA dan KOMA kegiatannya direncanakan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor Yang bertanggung jawab terhadap pemasaran komoditi kopi, cengkeh dan nilam (Base On Market).

### **g. Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil Perkebunan Tanaham Tahunan;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern).

### **5. Pengembangan Sektor Perikanan**

Pengembangan Sektor perikanan di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan sektor perikanan. Adapun strategi sektor pertanian tanaman



pangan adalah *Turn Around Strategy* yaitu Strategi dengan merubah haluan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Sugihwaras, Kedungpari, Karanglo, Gondek, Gedangan, Menganto, dan Sukomulyo.

#### **a. Jenis Komoditi Sektor Perikanan**

Jenis komoditi yang dikembangkan di Cluster Perikanan SKPP I adalah ikan lele, komoditi ini menjadi unggulan dan sudah menjadi bahan olahan menjadi Pecel lele di Kecamatan Perak.

#### **b. Rencana Lokasi Pengembangan Sektor Perikanan**

Rencana lokasi pengembangan sektor perikanan dengan komoditi unggulan lele direncanakan di Cluster perikanan (Desa Sugihwaras, Kedungpari, Karanglo, Gondek, Gedangan, Menganto, Sukomulyo). Lokasi cluster perikanan di SKPP I Kabupaten Jombang dengan luas 2154,48 Ha.

#### **c. Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Kegiatan Agroindustri yang dapat dikembangkan untuk komoditi lele adalah abon lele, pengemasan lele siap saji, bekasam lele (lele yang difermentasi). Kegiatan pengembangan agroindustri ikan lele ini dapat dikelola dalam home industry.

#### **d. Lokasi Agroindustri**

lokasi agroindustri ikan lele untuk pengembangan home industry bekasam lele dapat dilakukan di masing-masing desa pada cluster Perikanan. Untuk pembuatan abon lele, pengemasan lele siap saji membutuhkan skala industri yang lebih tinggi, untuk hal ini perlu direncanakan pembangunan industri skala menengah di Desa Gondek.

#### **e. Peranserta masyarakat**

Peranserta masyarakat pada pengembangan perikanan lele pada Kawasan Agropolitan SKPP I ini yang pengembangannya pada produk makanan bekasam lele (lele yang difermentasi) dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program UPP (unit pelayanan pengembangan) yaitu kelompok yang mawadahi budidaya ikan.

#### **f. Rencana Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kawasan Agropolitan berorientasi pada pengembangan sosial kapital, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal atau Koperasi Masyarakat Agribisnis Terintegrasi Vertikal (KOMATVA). KOMATVA terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group dan pemilikan group bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk ikan lele.

#### **g. Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).



## 6. Pengembangan Sektor Peternakan

Pengembangan Sektor peternakan di kawasan Agropolitan SKPP I didorong oleh strategi pengembangan sektor peternakan. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal dengan target tertentu dan dalam waktu singkat. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Ngoro, Kebondalem, Mundusewu, Karang, Pulorejo, Banyuarang, Sidowarek, Gajah, Sumberejo, Wonomerto, Wonosalam dan Desa Rejoagung.

### a. Jenis Komoditi Sektor Peternakan

Jenis komoditi yang dikembangkan di cluster peternakan ini adalah Sapi potong, sapi perah dan Ayam petelor. Jenis sapi potong antara lain jenis Simental, Limosin, PO/BX.

### b. Lokasi Rencana Pengembangan Sektor Peternakan

Rencana lokasi pengembangan sektor peternakan untuk komoditi sapi potong di Desa Ngoro, Kebondalem, Mundusewu, Karang, Pulorejo, Banyuarang, Sidowarek, Gajah, Sumberejo, Wonomerto. Rencana pengembangan komoditi Sapi Perah direncanakan di Desa Wonosalam dan Rencana Pengembangan komoditi Ayam Petelor di Desa Rejoagung. Rencana cluster pengembangan sektor peternakan ini memiliki luas 8087,64 Ha.

### **c. Agroindustri Yang Dikembangkan**

Agroindustri peternakan sapi potong yang dikembangkan meliputi: daging, abon daging sapi, dendeng sapi, darah sapi potong, tulang sapi dalam kemasan, tepung tulang dan penyamakan kulit serta industri kerajinan dari kulit sapi.

Agroindustri sapi perah yang dikembangkan meliputi keju, yogurt, pengemasan susu. Sedangkan untuk komoditi ayam petelor dapat dikembangkan menjadi daging ayam, abon daging ayam, kemoceng, bantal, telur ayam dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kue.

### **d. Rencana Lokasi Industri**

Lokasi industri daging sapi dalam kemasan, daging ayam, abon daging sapi dan ayam, dendeng sapi, tulang sapi dalam kemasan direncanakan di Desa karangan dan Desa Rejoagung. Pengembangan lokasi industri pembuatan keju, yogurt, dan pengemasan susu direncanakan di Desa Wonosalam. Lokasi industri pembuatan kemoceng dan bantal direncanakan secara home industry di Desa rejoagung.

### **e. Peranserta Masyarakat**

Peranserta masyarakat Kawasan Agropolitan SKPP I dalam pengembangan agribisnis sapi potong dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti Perkumpulan Peternak Sapi potong (PPSP).

#### **f. Pola Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kawasan Agropolitan berorientasi pada pengembangan sosial kapital, maka pola kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal atau Koperasi Masyarakat Agribisnis Terintegrasi Vertikal (KOMATVA). KOMATVA terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group dan pemilikan group bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk dari pengembangan sektor peternakan.

#### **g. Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:



- 1) Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- 3) Rencana penampungan produk usaha tani ke dalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

#### **4.4. Analisis Data Penelitian**

##### **1. Analisa Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Jombang**

Untuk mengetahui potensi sektor-sektor ekonomi yang mendukung PDRB Kabupaten Malang maka digunakan alat analisis LQ yaitu untuk mengetahui apakah sektor ekonomi tersebut termasuk sektor basis atau non basis. Dan untuk mendukungnya digunakan metode Shift Share yaitu untuk mengetahui komponen Differential Shift serta proportional shift sebuah sektor yang ada di Kabupaten Malang. Tahun analisis yang digunakan adalah tahun 2004 sampai tahun 2009. pada penelitian ini, analisis peneliti sajikan dalam jangka tahunan yang mencakup semua sektor dan akan dilihat perkembangan setiap tahunnya di PDRB.

##### **Tahun Analisis 2006 sampai 2007**

Pada tahun analisis ini sembilan sektor yang ada di PDRB akan dianalisis menggunakan Location Quotient dan Shift Share.

**(1) Analisis Location Quotient**

Analisis Location Quotien (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis (basic ekonomi) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (non basic sector). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan Location Quotien (LQ) Kabupaten Jombang pada tahun 2006-2007.

Tabel 4.16  
Analisis Location Quotient Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang tahun 2006-2007

Sektor	JATIM		KAB JOMBANG		LQ
	2006	2007	2006	2007	
Pertanian	46.486.278,00	47.942.973,38	2.627.868,65	2.988.420,82	1,8 (b)
industri pengolahan	72.786.972,17	76.163.917,95	1.057.751,25	1.197.866,88	0,5 (nb)
Pertambangan	10.065.201,24	11.179.428,07	232.218,51	254049,17	0,7 (nb)
listrik, gas, air bersih	8.730.422,33	5.154.634,89	103.848,61	144.143,15	0,4 (nb)
perdagangan, hotel	81.715.963,00	88.570.614,49	2.595.110,01	3.000.234,85	1,0 (b)
Pengangkutan	15.504.939,80	16.710.214,85	202.912,14	218.057,47	0,4 (nb)
Bangunan	9.030.294,53	9.139.600,65	209.145,86	228.526,34	0,7 (nb)
Keuangan	35.659.668,00	38.107.434,51	1.162.818,94	1312569,43	1,0 (b)
jasa-jasa	38.298.351,98	23.343.814,62	499.379,82	1.252.452,70	0,4 (nb)
Jumlah	279.979.739,07	292.968.818,79	8.191.673,97	9.343.868,11	

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, dengan menggunakan metode LQ pada tahun 2004 potensi basis Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian (1,8), Perdagangan dan hotel (1,0), dan sektor keuangan (1,0). Bahkan sektor ini dimungkinkan untuk di ekspor ke daerah luar kabupaten Jombang. Sedangkan enam sektor lainnya (industri pengolahan (0,5); pertambangan (0,4); pengangkutan (0,4); jasa-jasa (0,4); listrik, gas dan air bersih (0,4); dan bangunan (0,7) ) yang ada dalam PDRB Kabupaten Jombang bukan merupakan potensi basis.

## (2) Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Jombang dikaitkan dengan Propinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Berikut hasil analisis shift share Kabupaten Jombang dengan tahun analisis 2006-2007.



Tabel 4.17  
Analisis Shift Share Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang tahun  
2006-2007

Sektor	National Share	differential shift	proportional shift	Shift Share
pertanian	82.346,97	-39.567,55	278.205,20	320.984,62
industri pengolahan	49.074,29	2,11	91.041,34	140.117,74
pertambangan	25.706,80	14.933,50	-3.876,14	36.764,16
listrik, gas, air bersih	-42.534,09	-47.351,93	82.828,63	-7.057,39
perdagangan, hotel	217.687,88	97.293,13	187.436,96	502.417,97
pengangkutan	15.773,36	-6.359,67	-628,03	21.505,00
bangunan	2.531,58	-7.171,31	16.848,90	12.209,17
keuangan	79.818,73	25.872,15	69.931,76	175.622,64
jasa-jasa	-194.995,18	-218.162,88	948.068,06	534.910,00
jumlah	235.410			1.737.474

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel 4.17 pada tahun 2006-2007 sektor-sektor tersebut jika dibandingkan pertumbuhannya dengan provinsi maka sektor yang pertumbuhannya lebih cepat adalah sektor yang hasil analisis proportional shiftnya bernilai positif, yaitu pertanian; listrik, gas dan air bersih; perdagangan dan hotel; bangunan; industri pengolahan; keuangan; dan jasa-jasa. Sedangkan untuk sektor-sektor yang nilai proportional shiftnya bernilai negatif, yaitu pertambangan; dan pengangkutan.

Untuk komponen daya saing yang baik adalah sektor yang memiliki nilai positif pada hasil differential shiftnya jika dibandingkan dengan provinsi, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi adalah industri pengolahan; pertambangan; perdagangan dan hotel; pengangkutan; keuangan. Sedangkan sektor lainnya seperti pertanian;

listrik, gas, dan air bersih; bangunan; dan jasa-jasa kurang memiliki daya saing tinggi.

### **Tahun Analisis 2007 sampai 2008**

Pada tahun analisis ini sembilan sektor yang ada di PDRB akan dianalisis menggunakan Location Quotient dan Shift Share.

#### **(1) Analisis Location Quotient**

Analisis Location Quotien (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis (basic ekonomi) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (non basic sector). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan Location Quotien (LQ) Kabupaten Jombang pada tahun 2007-2008.

Tabel 4.18  
Analisis Location Quotient Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang  
tahun 2007-2008

Sektor	JAWA TIMUR		KAB. JOMBANG		LQ
	2007	2008	2007	2008	
pertanian	47.942.973,38	51.292.832,40	2.988.420,82	3.403.809,69	1,95 (b)
pertambangan	6.024.793,18	6.546.691,90	144.143,15	162.594,01	0,75 (nb)
Industri Pengolahan	76.163.917,95	78.358.633,81	1.197.866,88	1.362.774,55	0,49 (nb)
listrik, gas, air bersih	5.154.634,89	5.203.786,17	111.699,55	123.547,77	0,68 (nb)
perdagangan, hotel	88.570.614,49	97.238.306,92	3.000.234,85	3.559.751,71	1,06 (b)
pengangkutan	16.710.214,85	18.203.348,10	218.057,47	255.734,74	0,41 (nb)
bangunan	9.139.600,65	9.344.603,14	228.526,34	298.920,19	0,78 (nb)
keuangan	14.763.619,89	15.934.173,64	361.950,35	418.935,63	0,77 (nb)
jasa-jasa	23.343.814,62	24.380.880,64	950.619,08	1.252.452,70	1,27 (b)
Jumlah	287.814.183,90	306.503.256,72	9.201.518,49	10.838.520,99	

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, dengan menggunakan metode LQ pada tahun 2008 potensi basis Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian (1,95), Perdagangan dan hotel (1,06), dan sektor jasa-jasa (1,27). Bahkan sektor ini dimungkinkan untuk di ekspor ke daerah luar kabupaten Jombang. Sedangkan enam sektor lainnya (industri pengolahan (0,49); pertambangan (0,75); pengangkutan (0,41); keuangan (0,77); listrik, gas dan air bersih (0,68); dan bangunan (0,78) yang ada dalam PDRB Kabupaten Jombang bukan merupakan potensi basis.



## (2) Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Jombang dikaitkan dengan Propinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Berikut hasil analisis shift share Kabupaten Jombang dengan tahun analisis 2007-2008.



Tabel 4.19  
Analisis Shift Share Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang tahun  
2007-2008

Sektor	National Share	Differential shift	proportional shift	Shift Share
pertanian	194.052	14.755	206.583	415.389
pertambangan	9.360	3.127	5.964	18.451
Industri Pengolahan	77.783	-43.266	130.390	164.908
listrik, gas, air bersih	7.253	-6.188	10.783	11.848
perdagangan, hotel	194.819	98.790	265.908	559.517
pengangkutan	14.159	5.325	18.193	37.677
bangunan	14.839	-9.713	65.268	70.394
keuangan	23.503	5.195	28.288	56.985
jasa-jasa	61.728	-19.496	259.602	301.834

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel 4.19 pada tahun 2007-2008 sektor-sektor tersebut jika dibandingkan pertumbuhannya dengan provinsi maka sektor yang pertumbuhannya lebih cepat adalah sektor yang hasil analisis proportional shiftnya bernilai positif, yaitu semua sektor berada pada posisi positif. Sedangkan untuk sektor-sektor yang nilai proportional shiftnya bernilai negatif tidak ada.

Untuk komponen daya saing yang baik adalah sektor yang memiliki nilai positif pada hasil differential shiftnya jika dibandingkan dengan provinsi, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi adalah

pertanian; pertambangan; perdagangan dan hotel; pengangkutan; keuangan. Sedangkan sektor lainnya seperti industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; dan jasa-jasa kurang memiliki daya saing tinggi.

### **Tahun Analisis 2008 sampai 2009**

Pada tahun analisis ini sembilan sektor yang ada di PDRB akan dianalisis menggunakan Location Quotient dan Shift Share.

#### **(1) Analisis Location Quotient**

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis (basic ekonomi) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (non basic sector). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Jombang pada tahun 2008-2009.



Tabel 4.20  
Analisis Location Quotient Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang  
tahun 2008-2009

sektor	Jawa Timur		Kab. Jombang		LQ
	2008	2009	2008	2009	2009
pertanian	51.292.832,40	50.208.896,71	3.403.809,69	3.704.314,69	1,98 (b)
pertambangan	6.546.691,90	7.104.816,81	162.594,01	177.216,67	0,67 (nb)
Industri Pengolahan	78.358.633,81	83.299.893,42	1.362.774,55	1.487.150,16	0,48 (nb)
listrik, gas, air bersih	5.203.786,17	4.361.515,81	123.547,77	128.756,65	0,79 (nb)
perdagangan, hotel	97.238.306,92	95.983.867,09	3.559.751,71	3.967.251,77	1,11 (b)
pengangkutan	18.203.348,10	22.781.527,67	255.734,74	280.477,13	0,33 (nb)
bangunan	9.344.603,14	10.307.883,76	298.920,19	319.771,82	0,83 (nb)
keuangan	15.934.173,64	17.395.393,53	418.935,63	466.926,40	0,72 (nb)
jasa-jasa	24.380.880,64	29.417.374,11	1.252.452,70	1.403.182,20	1,28 (b)

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, dengan menggunakan metode LQ pada tahun 2009 potensi basis Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian (1,98), Perdagangan dan hotel (1,11), dan sektor jasa-jasa (1,28). Bahkan sektor ini dimungkinkan untuk di ekspor ke daerah luar kabupaten Jombang. Sedangkan enam sektor lainnya (industri

pengolahan (0,48); pertambangan (0,67); pengangkutan (0,83); keuangan (0,72); listrik, gas dan air bersih (0,79); dan bangunan (0,83) yang ada dalam PDRB Kabupaten Jombang bukan merupakan potensi basis.

## (2) Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Jombang dikaitkan dengan Propinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Berikut hasil analisis shift share Kabupaten Jombang dengan tahun analisis 2008-2009.

Tabel 4.21  
Analisis Shift Share Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang tahun  
2008-2009

sektor	National Share	Differential Shift	Proportional shift	Shift Share
pertanian	159.448,88	-231.379,22	372.435,34	300.505,00
pertambangan	7.616,59	6.245,03	761,04	14.622,66
Industri Pengolahan	63.838,14	22.097,80	38.439,67	124.375,61
listrik, gas, air bersih	5.787,50	-25.784,60	25.205,98	5.208,88
perdagangan, hotel	166.753,86	-212.677,07	453.423,26	407.500,06
pengangkutan	11.979,70	52.338,11	-39.575,42	24.742,39
bangunan	14.002,69	16.811,25	-9.962,31	20.851,63
keuangan	19.624,72	18.793,15	9.572,90	47.990,77
jasa-jasa	58.670,20	200.055,89	-107.996,59	150.729,50

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel 4.21 pada tahun 2008-2009 sektor-sektor tersebut jika dibandingkan pertumbuhannya dengan provinsi maka sektor yang pertumbuhannya lebih cepat adalah sektor yang hasil analisis proportional shiftnya bernilai positif, yaitu pertanian; listrik, gas dan air bersih; perdagangan dan hotel; industri pengolahan; keuangan; dan jasa-jasa. Sedangkan untuk sektor-sektor yang nilai proportional shiftnya bernilai negatif, yaitu bangunan; pengangkutan; dan jasa-jasa.

Untuk komponen daya saing yang baik adalah sektor yang memiliki nilai positif pada hasil differential shiftnya jika dibandingkan



dengan provinsi, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi adalah industri pengolahan; pertambangan; bangunan; pengangkutan; keuangan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya seperti pertanian; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan dan hotel kurang memiliki daya saing tinggi.

### **Tahun Analisis 2009 sampai 2010**

Pada tahun analisis ini sembilan sektor yang ada di PDRB akan dianalisis menggunakan Location Quotient dan Shift Share.

#### **(1) Analisis Location Quotient**

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis (basic ekonomi) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (non basic sector). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Jombang pada tahun 2009-2010.

Tabel 4.22  
Analisis Location Quotient Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang  
tahun 2009-2010

Sektor	Jawa Timur		Kab. Jombang		LQ
	2009	2010	2009	2010	2010
pertanian	50.208.896,71	51.329.548,83	3.704.314,69	4.250.483,65	2,09 (b)
pertambangan	7.104.816,81	7.757.319,82	177.216,67	197.800,02	0,64 (nb)
Industri Pengolahan	83.299.893,42	86.900.779,13	1.487.150,16	1.662.650,17	0,48 (nb)
listrik, gas, air bersih	4.361.515,81	4.642.081,81	128.756,65	132.670,20	0,72 (nb)
perdagangan, hotel	95.983.867,09	106.229.112,97	3.967.251,77	4.589.101,62	1,09 (b)
pengangkutan	22.781.527,67	25.076.425,54	280.477,13	314.393,76	0,32 (nb)
bangunan	10.307.883,76	10.992.599,79	319.771,82	355.958,22	0,82 (nb)
keuangan	17.395.393,53	18.659.490,17	466.926,40	513.278,05	0,69 (nb)
jasa-jasa	29.417.374,11	30.693.407,48	1.403.182,20	1.561.753,44	1,28 (b)

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, dengan menggunakan metode LQ pada tahun 2010 potensi basis Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian (2,09), Perdagangan dan hotel (1,09), dan sektor jasa-jasa (1,28). Bahkan sektor ini dimungkinkan untuk di ekspor ke daerah luar kabupaten Jombang. Sedangkan enam sektor lainnya (industri pengolahan (0,48); pertambangan (0,64); pengangkutan (0,32); keuangan (0,69); listrik, gas dan air bersih (0,72); dan bangunan (0,82) yang ada dalam PDRB Kabupaten Jombang bukan merupakan potensi basis.

## (2) Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Jombang dikaitkan dengan Propinsi Jawa

Timur. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Berikut hasil analisis shift share Kabupaten Jombang dengan tahun analisis 2008-2009.

Tabel 4.23  
Analisis Shift Share Sembilan sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang tahun 2008-2009

Sektor	National Share	Differential shift	Proportional Shift	Shift Share
Pertanian	247.287,41	-164.607,87	463.489,43	546.168,96
pertambangan	11.830,38	4.445,11	4.307,85	20.583,35
Industri Pengolahan	99.277,07	-34.990,58	111.213,52	175.500,01
listrik, gas, air bersih	8.595,35	-312,74	-4.369,06	3.913,55
perdagangan, hotel	264.840,19	158.621,29	198.388,38	621.849,85
pengangkutan	18.723,70	9.530,18	5.662,76	33.916,63
Bangunan	21.346,88	-105,57	14.945,10	36.186,40
Keuangan	31.170,41	2.760,41	12.420,82	46.351,65
jasa-jasa	93.671,66	-32.806,01	97.705,60	158.571,24

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari tabel 4.23 pada tahun 2009-2010 sektor-sektor tersebut jika dibandingkan pertumbuhannya dengan provinsi maka sektor yang pertumbuhannya lebih cepat adalah sektor yang hasil analisis



proportional shiftnya bernilai positif, yaitu pertanian; listrik, gas dan air bersih; perdagangan dan hotel; industri pengolahan; keuangan; dan jasa-jasa. Sedangkan untuk sektor-sektor yang nilai proportional shiftnya bernilai negatif, yaitu bangunan; pengangkutan; dan jasa-jasa.

Untuk komponen daya saing yang baik adalah sektor yang memiliki nilai positif pada hasil differential shiftnya jika dibandingkan dengan provinsi, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi adalah industri pengolahan; pertambangan; bangunan; pengangkutan; keuangan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya seperti pertanian; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan dan hotel kurang memiliki daya saing tinggi.

### **Analisis Rata-Rata Analisis Location Quotient dan Shift Share Tahun 2006-2010 di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data pertahun yang telah dijelaskan diatas, maka untuk mengetahui gambaran umum potensi ekonomi basis Kabupaten Jombang mulai tahun 2006-2010 perlu dilakukan perhitungan rata-ratanya. Rata-rata pada analisis Location Quotient dan juga rata-rata dengan menggunakan analisis shift share

#### **a. Analisis Location Quotient**

Untuk mengetahui potensi basis rata-rata di Kabupaten Jombang maka dilakukan penjumlahan hasil dari hasil perhitungan Location Quotient dari tahun 2006 sampai 2010 kemudian dibagi lima (jumlah tahun analisis). Perhitungan ini dibutuhkan untuk mengetahui gambaran sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Jombang

sedangkan analisis yang ada diatas pertahun 2006 sampai 2010 hanya mengetahui potensi unggulan satu tahun saja. Sektor-sektor yang dapat diekspor dan sektor yang sudah mapan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Jombang pada tahun 2006 sampai 2010 secara umum (tidak spsefik pertahun).

Tabel 4.24

Rata-Rata LQ pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2007-2010

Sektor	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Pertanian	1,77	1,95	1,98	2,09	1,95
pertambangan	0,45	0,75	0,67	0,64	0,63
Industri Pengolahan	0,72	0,49	0,48	0,48	0,54
listrik, gas, air bersih	0,37	0,68	0,79	0,72	0,64
perdagangan, hotel	0,99	1,06	1,11	1,09	1,06
pengangkutan	0,41	0,41	0,33	0,32	0,37
bangunan	0,72	0,78	0,83	0,82	0,79
keuangan	1,02	0,77	0,72	0,69	0,80
jasa-jasa	0,41	1,27	1,28	1,28	1,06

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Berdasarkan rata-rata analisis LQ, maka sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan bahkan memiliki kemampuan untuk bisa diekspor dari tahun 2007 sampai 2010 adalah pertanian; perdagangan dan Hotel; jasa-jasa. Sedangkan enam sektor lain yakni pertambangan (0,63); industri pengolahan (0,54); listrik,air, dan gas (0,64); pengangkutan (0,37); bangunan (0,79); dan keuangan (0,80) bukan merupakan sektor

basis. Bahkan dimungkinkan bahwa Kabupaten Jombang harus mengimpor beberapa sektor tersebut.

#### b. Analisis Differential Shift

Tabel dibawah ini akan menunjukkan rata-rata Differential Shift di Kabupaten Jombang mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Berdasarkan perhitungan, ada sektor yang differential shiftnya bernilai negatif pada tahun analisis tertentu, tetapi pada tahun analisis yang lain sektor tersebut bernilai positif, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi rata-rata atau gambaran umum sektor-sektor pada tahun 2006 sampai 2010. hal ini juga akan dibutuhkan untuk menentukan tipologi masing-masing sektor yang akan dibahas selanjutnya.

Tabel 4.25

Rata-Rata Differential Shift pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang  
Tahun 2006-2010

Sektor	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	rata-rata
pertanian	-39.567,55	14.754,53	-231.379,22	-164.607,87	-105.200,03
pertambangan	2,11	3.126,56	6.245,03	4.445,11	3.454,70
Industri Pengolahan	14.933,50	-43.265,54	22.097,80	-34.990,58	-10.306,20
listrik, gas, air bersih	-47.351,93	-6.188,06	-25.784,60	-312,74	-19.909,33
perdagangan, hotel	97.293,13	98.790,03	-212.677,07	158.621,29	35.506,85
pengangkutan	6.359,67	5.324,97	52.338,11	9.530,18	18.388,23
bangunan	-7.171,31	-9.713,37	16.811,25	-105,57	-44,75
keuangan	25.872,15	5.194,66	18.793,15	2.760,41	13.155,09
jasa-jasa	-218.162,88	-19.496,04	200.055,89	-32.806,01	-17.602,26

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)



Berdasarkan tabel 4.25 diatas, dapat diketahui secara rata-rata dalam kurun waktu mulai 2006-2010 sektor-sektor yang memiliki daya saing lebih tinggi di tingkat Jawa Timur adalah pertambangan, perdagangan dan hotel, pengangkutan, dan keuangan. Sedangkan sektor lain seperti pertanian; industri pengolahan; listrik,air dan gas; bangunan; dan jasa-jasa masih belum bisa bersaing di tingkat Jawa Timur.

### c. Perhitungan akhir Shift Share

Perhitungan akhir shift share merupakan penjumlahan dari tiga komponen dalam shift share, yaitu proportional shift, differential shift, dan national share. Dengan analisis ini dapat diketahui produktivitas suatu daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional).

Tabel 4.26

Rata-Rata Shift Share pada 9 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010

Sektor	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	rata-rata
pertanian	320.984,62	415.388,87	300.505,00	546.168,96	395.761,86
pertambangan	140.117,74	18.450,86	14.622,66	20.583,35	48.443,65
Industri Pengolahan	36.764,16	164.907,67	124.375,61	175.500,01	125.386,86
listrik, gas, air bersih	-7.057,39	11.848,22	5.208,88	3.913,55	3.478,32
perdagangan, hotel	502.417,97	559.516,86	407.500,06	621.849,85	522.821,18
pengangkutan	21.505,00	37.677,27	24.742,39	33.916,63	29.460,32
bangunan	12.209,17	70.393,85	20.851,63	36.186,40	34.910,26
keuangan	175.622,64	56.985,28	47.990,77	46.351,65	81.737,59
jasa-jasa	534.910,00	301.833,62	150.729,50	158.571,24	286.511,09

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa seluruh sektor ekonomi tidak ada yang mengalami negatif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan setiap sektor yang ada dalam Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jombang selama periode 2006 sampai 2010

mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan perhitungan diatas sektor yang menduduki posisi tertinggi adalah sektor perdagangan dan hotel (522.821,18) sedangkan yang paling rendah adalah sektor air, listrik, dan gas (3.478,32)

## 2. Analisis SWOT Perekonomian Kabupaten Jombang

### a) Kekuatan

Kekuatan ekonomi Jombang terletak pada sektor perdagangan dan hotel. Berdasarkan analisis LQ sektor ini merupakan sektor basis unggulan meskipun masih dibawah pertanian. Akan tetapi disini daya saing, sektor perdagangan dan hotel adalah sektor yang mampu bersaing keluar Jombang dalam hal ini Jawa Timur. Kekuatan sektor ini juga masih didukung dengan letak strategis Kabupaten Jombang yang berada pada jalur Surabaya-Jakarta dan Malang-Tuban.

### b) Kelemahan

Kelemahan Kabupaten Jombang terletak pada sektor listrik, air dan gas. Dimana sektor ini bukan sektor basis dan juga tidak memiliki daya saing keluar Jombang. Berdasarkan hasil analisis LQ rata-rata, sektor ini termasuk non basis yang bukan terendah. Akan tetapi jika dilihat dari analisa differential shift, dan proporsional shift, hasilnya kurang memuaskan.

**c) Peluang**

Peluang ada pada sektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor basis terbesar di Jombang berdasarkan analisis LQ. Namun tingkat daya saing yang masih jauh jika diluar Jombang menjadi kelemahan yang harus dicari solusi. Namun jika berbicara peluang, peluang sektor ini sangatlah terbuka. Hal ini dikarenakan sektor perdagangan yang menjadi kekuatan Kabupaten Jombang dan juga terbantu oleh letak strategis Kabupaten Jombang, maka peluang pertanian Kabupaten Jombang dapat bersaing di Jawa Timur masih terbuka.

**d) Ancaman**

Seperti halnya dengan peluang Kabupaten Jombang dalam berdaya saing di Jawa Timur, sektor pertanian adalah ancaman terbesar bagi Kabupaten Jombang. Sebab jika dilihat berdasarkan differential shift, tingkat ketertinggalan pertanian Jawa Timur dengan Kabupaten terlalu tinggi dibandingkan sektor lain. Selain itu alasan sektor ini menjadi ancaman adalah dikarenakan Pemerintah Kabupaten Jombang juga berusaha memanfaatkan sejumlah potensi pertaniannya. Tetapi disatu sisi daerah lain di Jawa Timur yang memiliki keunggulan daya saing bidang pertanian terus mengembangkan hasil-hasil pertaniannya.



### 3. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang

Arsyad (dalam Subandi, 2009:116-117) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu strategi pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Setiap organisasi, baik itu organisasi publik, maupun organisasi privat mempunyai sejumlah langkah-langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktifitas kegiatan. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rangkaian dari perencanaan suatu kegiatan, yang meliputi berbagai kebijakan dalam

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Afif (1987:9) menyatakan bahwa strategi adalah suatu tindakan penyesuaian tertentu untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu (baru dan khas) yang dianggap penting dimana tindakan penyesuaian dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi, perlu juga dilihat bahwa suatu daerah memiliki potensi sendiri-sendiri. Potensi Daerah seperti yang disimpulkan Muktiyanto (dalam Sumihardjo 2008:12) merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sumihardjo (2008:12) potensi daerah pada umumnya meliputi:

6. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan peternakan.
7. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan.
8. Potensi energy dan sumber daya mineral seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa.
9. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi, dan pariwisata.
10. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.



Di dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah pemerintah tentunya melihat berbagai potensi-potensi yang dimiliki daerah. Di sini pemerintah Kabupaten Jombang berusaha melakukan penyesuaian potensi khususnya bidang ekonomi seperti yang telah diungkapkan diatas. Hal ini dilihat dari Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun visi dan misi pembangunan ekonominya. Berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Jombang seperti yang terdapat dalam dokumen RPJP yakni menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sentra agrobisnis besar di Jawa Timur Tahun 2025. Kondisi wilayah Kabupaten Jombang yang sebagian besar masih menjadi lahan pertanian nampaknya bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Dalam menerapkan strategi pembangunan yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan seperti yang terdapat dalam baik RTRW, RPJP, maupun RPJM. Banyak langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyiapkan strategi pembangunan ekonomi berbasis bidang pertanian. Seperti yang terdapat pada RTRW Kabupaten Jombang yang memproyeksikan suatu wilayah khusus pengembangan pertanian (SKPP) di Mojowarno dan sekitarnya, dijadikan sebagai wilayah produksi sekaligus pengembangan hasil pertanian. Lalu didukung dengan yang terdapat pada Penetapan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Jombang. Didalam Penetapan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Jombang terdapat banyak strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Mulai dari proyeksi ketersediaan lahan, sarana-prasarana seperti pasar, lembaga



keuangan, juga laboratorium untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Jombang.

Agrobisnis adalah sebuah pola ekonomi yang berbasis pada pertanian. Pertanian identik dengan bahan pangan seperti padi (beras), buah-buahan, sayur-sayuran, ketela dan masih banyak lagi. Dengan mengandalkan pertanian sebagai bisnis utama, jelas mampu meminimalisir bahkan menghilangkan kekhawatiran akan kekurangan pangan. Banyaknya produk hasil pertanian, bisa menjadi banyak alternatif pangan yang tersedia, meskipun beras juga tidak kekurangan stok karena pada umumnya petani menanam padi.

Akan tetapi jika berbicara daya saing, khususnya daya saing keluar Kabupaten Jombang. Masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Jombang. Meskipun di Jombang hasil-hasil pertanian sangat banyak, tetapi untuk bisa bersaing di luar Jombang masih belum mampu. Jika dikembalikan pada konsep teori Arsyad tentang pembangunan ekonomi daerah, maka sudah seharusnya pemerintah bersama masyarakat khususnya Kabupaten Jombang bahu membahu dan terus berupaya memajukan perekonomian Jombang berbasis pertanian. Sebab pertanian masih menjadi salah satu dari pilar terbesar PDRB Kabupaten Jombang.

Oleh sebab itu, dengan program-program yang telah dilakukan untuk memajukan sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan dan mendongkrak daya saing khususnya di Jawa Timur. Sebab sektor pertanian jika dilihat berdasarkan LQ rata-rata sejak 2006-2010 adalah

sektor basis terbesar di Jombang mengalahkan perdagangan dan hotel yang justru memiliki daya saing keluar yakni Jawa Timur. Dengan membuat kawasan agropolitan, diharapkan mampu meningkatkan daya saing minimal tahun berikutnya mengalami peningkatan. Sebab sektor pertanian yang menjadi basis ini sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan dalam membangun perekonomian Kabupaten Jombang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas lapangan kerja. Pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang berfokus pada sektor agrobisnis. Hal ini dikarenakan kuatnya sektor pertanian yang dilihat dari PDRB Kabupaten Jombang. Berdasarkan input dan output yang terdapat pada PDRB Kabupaten Jombang, sektor pertanian adalah sektor terbesar dan sekaligus menjadi potensi berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian atau yang lebih dikenal dengan agroindustri.

Arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJP dan RPJM adalah menjadikan Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah pusat agrobisnis terbesar di Jawa Timur. Dalam upaya mewujudkan sebagai pusat agrobisnis terbesar di Jawa Timur adalah dengan membuat atau menciptakan kawasan Agropolitan di SKPP I SSWP Mojowarno. Tujuan dari pembangunan kawasan agropolitan adalah adanya integritas serta keterkaitan yang tergabung dalam satu sistem agrobisnis, dimana didalamnya juga menyangkut tentang agroindustri. Selain dengan pembangunan kawasan agropolitan, strategi pembangunan ekonomi berdasarkan potensi Kabupaten Jombang adalah dengan mengembangkan pertanian, baik itu



tanaman pangan seperti padi, sayur, buah, perikanan, peternakan, dan tanaman musiman. Hampir semua sektor tersebut mengambil strategi pengembangan secara *rapid* (cepat). Hal ini tidak lepas dari strategi pada arah dan kebijakan pembangunan ekonomi yang membuat kawasan cepat tumbuh agrobisnis di SKPP I (SSWP Mojowarno).

Berdasarkan analisis LQ Shift Share menunjukkan bahwa pertanian memang menjadi sektor basis di Kabupaten Jombang. Hal ini bisa dilihat pada hasil perhitungan rata-rata LQ menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor basis terbesar dibanding sektor basis lainnya. Akan tetapi berdasarkan analisis differential Shift menunjukkan bahwa pertanian yang merupakan sektor basis besar di Jombang belum mampu bersaing di Jawa Timur. Hal ini bisa dilihat bahwa nilai rata-rata dari differential Shift pertanian mengalami nilai negatif. Justru sektor basis lainnya yakni perdagangan memiliki daya saing di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membangun ekonomi dalam meningkatkan daya saing berbasis potensi, tidak main-main. Hal ini jika dirujuk pada visi dan misi pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang seperti yang tertuang pada RPJP yakni menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sentra agrobisnis terbesar di Jawa Timur. Keberanian pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengambil agrobisnis sebagai daya saing perlu diapresiasi dan didukung. Sebab jika dilihat dari analisis differential shiftnya pertanian merupakan sektor yang tidak memiliki daya saing di Jawa Timur. Ini artinya bahwa untuk menggapai tujuan

tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang harus bekerja sangat keras agar mampu bersaing di Jawa Timur.

Salah satu keunggulan yang dimiliki sekaligus peluang adalah dengan mengkombinasikan dengan perdagangan yang juga didukung dengan kekuatan lembaga keuangan yang masih mampu bersaing di Jawa Timur. Dengan demikian maka besar peluang bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan mimpi dari pembangunan jangka panjang yakni menjadikan Jombang sebagai sentra agrobisnis besar di Jawa Timur. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jombang masih harus bekerja keras terutama mendongkrak sektor pertanian agar mampu bersaing di level Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi kelema

## **B. Saran**

- a. Pemerintah Kabupaten Jombang harus lebih keras dalam meningkatkan pertanian agar mampu bersaing di Jawa Timur.
- b. Perlu differensiasi hasil pertanian yang ada sekarang yang dapat menjadikan Jombang punya daya saing di pertanian khususnya tanaman-tanaman yang sulit tumbuh di daerah lain.
- c. Mengajak masyarakat Jombang untuk berperan dan mengawal program pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis. Supaya visi dan misi jangka panjang dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- , 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- , 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sejak Pelita I)*. Jakarta: FEUI.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Subandi. 2009. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Kartasasmita, Ginanjar. 2007. *Revitalisasi Administrasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Makalah disajikan dalam acara wisuda ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. STIA LAN Jakarta. Jakarta, 3 November 2007.
- Priadi, Agung. 2005. *Analisis Struktur Perekonomian Atas Dasar Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Kurun Waktu 1999 – 2003*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Riyadi dan Brantakusumah, Dedy Supryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjeb Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia



Moloeng, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN

----- . 1993. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Media Widya Mandala.

Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: CV Mandar Maju.

Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press.

----- . 1995. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

----- . 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Hunger & Wheelen, 2001, *Manajemen Strategis (Alih Bahasa : Agung)*, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Bappeda Kab. Jombang dan LPPM-ITS. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang Tahun 2009*. Jombang.

Bappeda Kab. Jombang. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014*. Jombang

----- . 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Jombang

----- . 2010. *Penetapan Kawasan Agropolitan Di Kawasan Kabupaten Jombang (Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian I (SKPP I) Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Pertanian Terpadu Berbasis Rencana Tata Ruang)*. Jombang

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2010. *Jombang Dalam Angka Tahun 2010*. Jombang

Pemerintah Kabupaten Jombang. 2009. *Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029*. Jombang

#### **ARTIKEL LAIN**

Sutikno. 2011. *Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (studi pada wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur)*. Artikel. Universitas Muhammadiyah Malang

Siahaan, Bisuk. 1996. *Industrialisasi di Indonesia*. Pustaka Data.

#### **INTERNET**

Kartasasmita, Ginanjar. Administrasi Bagi Pembangunan. Diakses pada tanggal 26 Maret 2011. <http://www.ginanjara.com>

----- . Administrasi Pembangunan di Indonesia. Diakses pada tanggal 26 Maret 2011. <http://www.ginanjara.com>

Firmansyah, Herlan. Pembangunan Ekonomi. Diakses pada tanggal 8 Mei 2011. <http://erlan-abuhanifa.blogspot.com>

Bappeda Kab. Jombang. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Diakses pada tanggal 16 Mei 2011. <http://www.jombangkab.go.id>